



**SALINAN**

**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 33 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Standar Harga Satuan Regional;**

**Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**  
**2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL.**

**Pasal 1 . . .**



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

**Pasal 1**

- (1) Dengan Peraturan Presiden ini ditetapkan standar harga satuan regional.
- (2) Standar harga satuan regional meliputi:
  - a. satuan biaya honorarium;
  - b. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
  - c. satuan biaya rapat/pertemuan di dalam dan di luar kantor;
  - d. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas; dan
  - e. satuan biaya pemeliharaan.
- (3) Standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

**Pasal 2**

- (1) Standar harga satuan regional digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Dalam perencanaan anggaran, standar harga satuan regional berfungsi sebagai:
  - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
  - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
  - c. bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah.

(3) Dalam . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**- 3 -**

- (3) Dalam pelaksanaan anggaran, standar harga satuan regional berfungsi sebagai:
- a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
  - b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

**Pasal 3**

- (1) Kepala daerah menetapkan standar harga satuan biaya honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor, pengadaan kendaraan dinas, dan pemeliharaan berpedoman pada standar harga satuan regional sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran.
- (2) Kepala daerah dapat menetapkan standar harga satuan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 4**

- (1) Khusus ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri bagi pemerintahan daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran kementerian negara/lembaga.

(2) Ketentuan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

- (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri bagi pemerintahan daerah diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

#### **Pasal 5**

- (1) Dalam hal terdapat perubahan harga pasar dan/atau kebijakan di bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran, dapat dilakukan perubahan standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
- (2) Ketentuan mengenai perubahan standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

#### **Pasal 6**

Ketentuan mengenai standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan standar biaya perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan paling lambat untuk perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021.

#### **Pasal 7**

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Februari 2020

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

**JOKO WIDODO**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Februari 2020

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

**YASONNA H. LAOLY**

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 57**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

Deputi Bidang Hukum dan  
Undang-undangan,



*[Signature]*  
Silvana Djaman



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAMPIRAN I**

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 33 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL**

**STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL YANG BERFUNGSI SEBAGAI  
BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Presiden ini bertujuan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing daerah yang selanjutnya digunakan untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD). Standar harga satuan yang ditetapkan oleh kepala daerah berdasarkan standar harga satuan regional dalam Peraturan Presiden ini digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Presiden ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari:

1. satuan biaya honorarium;
2. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
3. satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor; dan
4. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas.

Standar . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

Standar harga satuan regional yang diatur dalam Peraturan Presiden ini merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan regional.

**1. SATUAN BIAYA HONORARIUM**

Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:

**1.1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan**

Honorarium diberikan kepada:

- 1.1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- 1.1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- 1.1.3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD);
- 1.1.4. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan
- 1.1.5. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu.

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kepada penanggung jawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA.

b. untuk . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- b. untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan SKPD, KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada honorarium PPK SKPD sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya.
- c. ketentuan jumlah PPK SKPD diatur sebagai berikut:
  - 1) jumlah PPK SKPD yang membantu KPA:
    - a) KPA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, jumlah PPK SKPD paling banyak 6 (enam) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu; dan
    - b) KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK SKPD paling banyak 3 (tiga) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu.
  - 2) jumlah keseluruhan PPK SKPD yang membantu PPTK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK.
  - 3) jumlah PPK SKPD untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai berikut:
    - a) jumlah PPK SKPD tidak boleh melampaui jumlah PPK SKPD sebelum penggabungan; dan
    - b) besaran honorarium PPK SKPD didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PPK SKPD.
- d. jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola; dan
- e. dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.2. Honorarium . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

## **1.2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**

### **1.2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa**

Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **1.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa**

Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **1.2.3. Honorarium Pengguna Anggaran**

Honorarium diberikan kepada pengguna anggaran dalam hal:

- a. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- b. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.

## **1.3. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)**

Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.

## **1.4. Honorarium . . .**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

#### 1.4. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

##### 1.4.1. Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- b. narasumber atau pembahas berasal dari:
  - 1) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
  - 2) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- c. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

##### 1.4.2. Honorarium . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

#### 1.4.2. Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
- b. moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

#### 1.4.3. Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat.

#### 1.4.4. Honorarium . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

#### **1.4.4. Honorarium Panitia**

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

#### **1.5. Honorarium . . .**



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

**1.5. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

| No | Jabatan                                              | Klasifikasi |    |     |
|----|------------------------------------------------------|-------------|----|-----|
|    |                                                      | I           | II | III |
| 1  | Pejabat Eselon I dan Eselon II                       | 2           | 3  | 4   |
| 2  | Pejabat Eselon III                                   | 3           | 4  | 5   |
| 3  | Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional | 5           | 6  | 7   |

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

- a. Klasifikasi I dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- b. Klasifikasi II dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.

c. Klasifikasi . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

- c. Klasifikasi III dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.

#### **1.5.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan**

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
- b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
  - 1) dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau
  - 2) antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.
- c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
- e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

#### **1.5.2. Honorarium . . .**



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

#### **1.5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau
- b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

#### **1.6. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara**

##### **1.6.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli**

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

Dalam . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

#### **1.6.2. Honorarium Beracara**

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

#### **1.7. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan**

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Presiden ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota dengan ketentuan:

- a. lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- b. lulusan DI/DII/DIII/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- c. lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- d. lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat; dan

e. lulusan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

- e. lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat.

**1.8. Honorarium Rohaniwan**

Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.

**1.9. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola *Website***

**1.9.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal**

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (*peer review*) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.

**1.9.2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah**

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

**1.9.3. Honorarium . . .**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

#### 1.9.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau *Website*

Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau *website* dapat diberikan kepada pengelola *website* atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah. *Website* atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau *website* sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau *website* tidak diberikan honorarium dimaksud.

#### 1.10. Honorarium Penyelenggara Ujian

Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

- #### 1.11. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten, atau Kota
- Honorarium penulisan butir soal tingkat provinsi, kabupaten, atau kota diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

#### 1.12. Honorarium . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

## 1.12. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

### 1.12.1. Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
- b. berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat; atau
- c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

### 1.12.2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

### 1.12.3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 1.12.4. Honorarium . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

**1.12.4. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan**

Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

**1.12.5. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan pelatihan**

Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;

b. dilakukan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

- b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
- c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
- e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

**1.13. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

Satuan biaya honorarium terinci pada Tabel 1.1

**TABEL 1.1  
SATUAN BIAYA HONORARIUM**

| NO   | URAIAN                                                                        | SATUAN | BESARAN        |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|
| (1)  | (2)                                                                           | (3)    | (4)            |
| 1.1. | HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN                                |        |                |
|      | 1.1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) |        |                |
|      | a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta                                            | OB     | Rp1.040.000,00 |

b. Nilai . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

| NO  | URAIAN                                                    | SATUAN | BESARAN        |
|-----|-----------------------------------------------------------|--------|----------------|
| (1) | (2)                                                       | (3)    | (4)            |
|     | b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta     | OB     | Rp1.250.000,00 |
|     | c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta     | OB     | Rp1.450.000,00 |
|     | d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar     | OB     | Rp1.660.000,00 |
|     | e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar   | OB     | Rp1.970.000,00 |
|     | f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar   | OB     | Rp2.280.000,00 |
|     | g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar    | OB     | Rp2.590.000,00 |
|     | h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar   | OB     | Rp3.010.000,00 |
|     | i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar   | OB     | Rp3.420.000,00 |
|     | j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar   | OB     | Rp3.840.000,00 |
|     | k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar  | OB     | Rp4.250.000,00 |
|     | l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar | OB     | Rp4.770.000,00 |
|     | m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar | OB     | Rp5.290.000,00 |
|     | n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar | OB     | Rp5.810.000,00 |
|     | o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun  | OB     | Rp6.330.000,00 |
|     | p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun                    | OB     | Rp7.370.000,00 |
|     | 1.1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)           |        |                |
|     | a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta                        | OB     | Rp1.010.000,00 |
|     | b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta     | OB     | Rp1.210.000,00 |
|     | c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta     | OB     | Rp1.410.000,00 |
|     | d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar     | OB     | Rp1.610.000,00 |
|     | e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar   | OB     | Rp1.910.000,00 |
|     | f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar   | OB     | Rp2.210.000,00 |

g. Nilai . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 18 -

| NO     | URAIAN                                                                  | SATUAN | BESARAN        |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|
| (1)    | (2)                                                                     | (3)    | (4)            |
|        | g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar                  | OB     | Rp2.520.000,00 |
|        | h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar                 | OB     | Rp2.920.000,00 |
|        | i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar                 | OB     | Rp3.320.000,00 |
|        | j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar                 | OB     | Rp3.720.000,00 |
|        | k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar                | OB     | Rp4.130.000,00 |
|        | l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar               | OB     | Rp4.630.000,00 |
|        | m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar               | OB     | Rp5.130.000,00 |
|        | n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar               | OB     | Rp5.640.000,00 |
|        | o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun                | OB     | Rp6.140.000,00 |
|        | p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun                                  | OB     | Rp7.140.000,00 |
|        |                                                                         |        |                |
| 1.1.3. | Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) |        |                |
|        | a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta                                      | OB     | Rp400.000,00   |
|        | b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta                   | OB     | Rp480.000,00   |
|        | c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta                   | OB     | Rp570.000,00   |
|        | d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar                   | OB     | Rp660.000,00   |
|        | e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar                 | OB     | Rp770.000,00   |
|        | f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar                 | OB     | Rp880.000,00   |
|        | g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar                  | OB     | Rp990.000,00   |
|        | h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar                 | OB     | Rp1.250.000,00 |
|        | i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar                 | OB     | Rp1.520.000,00 |
|        | j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar                 | OB     | Rp1.780.000,00 |
|        | k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar                | OB     | Rp2.040.000,00 |

1. Nilai . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 19 -

| NO     | URAIAN                                                    | SATUAN | BESARAN        |
|--------|-----------------------------------------------------------|--------|----------------|
| (1)    | (2)                                                       | (3)    | (4)            |
|        | l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar | OB     | Rp2.440.000,00 |
|        | m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar | OB     | Rp2.830.000,00 |
|        | n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar | OB     | Rp3.230.000,00 |
|        | o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun  | OB     | Rp3.620.000,00 |
|        | p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun                    | OB     | Rp4.420.000,00 |
|        |                                                           |        |                |
| 1.1.4. | Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan           |        |                |
|        | a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta                        | OB     | Rp340.000,00   |
|        | b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta     | OB     | Rp420.000,00   |
|        | c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta     | OB     | Rp500.000,00   |
|        | d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar     | OB     | Rp570.000,00   |
|        | e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar   | OB     | Rp670.000,00   |
|        | f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar   | OB     | Rp770.000,00   |
|        | g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar    | OB     | Rp860.000,00   |
|        | h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar   | OB     | Rp1.090.000,00 |
|        | i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar   | OB     | Rp1.320.000,00 |
|        | j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar   | OB     | Rp1.550.000,00 |
|        | k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar  | OB     | Rp1.780.000,00 |
|        | l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar | OB     | Rp2.120.000,00 |
|        | m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar | OB     | Rp2.470.000,00 |
|        | n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar | OB     | Rp2.810.000,00 |
|        | o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun  | OB     | Rp3.160.000,00 |
|        | p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun                    | OB     | Rp3.840.000,00 |

1.1.5. Bendahara . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 20 -

| NO       | URAIAN                                                                 | SATUAN | BESARAN        |
|----------|------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|
| (1)      | (2)                                                                    | (3)    | (4)            |
| 1.1.5.   | Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu      |        |                |
|          | a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta                                     | OB     | Rp260.000,00   |
|          | b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta                  | OB     | Rp310.000,00   |
|          | c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta                  | OB     | Rp370.000,00   |
|          | d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar                  | OB     | Rp430.000,00   |
|          | e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar                | OB     | Rp500.000,00   |
|          | f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar                | OB     | Rp570.000,00   |
|          | g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar                 | OB     | Rp640.000,00   |
|          | h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar                | OB     | Rp810.000,00   |
|          | i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar                | OB     | Rp980.000,00   |
|          | j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar                | OB     | Rp1.150.000,00 |
|          | k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar               | OB     | Rp1.330.000,00 |
|          | l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar              | OB     | Rp1.580.000,00 |
|          | m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar              | OB     | Rp1.840.000,00 |
|          | n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar              | OB     | Rp2.090.000,00 |
|          | o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun               | OB     | Rp2.350.000,00 |
|          | p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun                                 | OB     | Rp2.860.000,00 |
| 1.2.     | HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA                                       |        |                |
| 1.2.1.   | Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa                               | OB     | Rp680.000,00   |
| 1.2.2.   | Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa              |        |                |
| 1.2.2.1. | Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi) |        |                |
|          | a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 juta                       | OP     | Rp680.000,00   |
|          | b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta             | OP     | Rp850.000,00   |

c. Nilai . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 21 -

| NO  | URAIAN                                                                                                    | SATUAN | BESARAN        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|
| (1) | (2)                                                                                                       | (3)    | (4)            |
|     | c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar                                                | OP     | Rp1.020.000,00 |
|     | d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar                                              | OP     | Rp1.270.000,00 |
|     | e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar                                              | OP     | Rp1.520.000,00 |
|     | f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar                                               | OP     | Rp1.780.000,00 |
|     | g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar                                              | OP     | Rp2.120.000,00 |
|     | h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar                                              | OP     | Rp2.450.000,00 |
|     | i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar                                              | OP     | Rp2.790.000,00 |
|     | j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar                                             | OP     | Rp3.130.000,00 |
|     | k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar                                            | OP     | Rp3.580.000,00 |
|     | l. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar                                            | OP     | Rp4.030.000,00 |
|     | m. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar                                            | OP     | Rp4.490.000,00 |
|     | n. Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun                                             | OP     | Rp4.940.000,00 |
|     | o. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun                                                               | OP     | Rp5.560.000,00 |
|     |                                                                                                           |        |                |
|     | 1.2.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang (Nonkonstruksi) |        |                |
|     | a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 juta                                                          | OP     | Rp760.000,00   |
|     | b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta                                                | OP     | Rp760.000,00   |
|     | c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar                                                | OP     | Rp920.000,00   |
|     | d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar                                              | OP     | Rp1.140.000,00 |
|     | e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar                                              | OP     | Rp1.370.000,00 |
|     | f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar                                               | OP     | Rp1.600.000,00 |
|     | g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar                                              | OP     | Rp1.910.000,00 |

h. Nilai . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 22 -

| NO  | URAIAN                                                                                                                 | SATUAN | BESARAN        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|
| (1) | (2)                                                                                                                    | (3)    | (4)            |
|     | h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar                                                           | OP     | Rp2.210.000,00 |
|     | i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar                                                           | OP     | Rp2.520.000,00 |
|     | j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar                                                          | OP     | Rp2.820.000,00 |
|     | k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar                                                         | OP     | Rp3.230.000,00 |
|     | l. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar                                                         | OP     | Rp3.640.000,00 |
|     | m. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar                                                         | OP     | Rp4.040.000,00 |
|     | n. Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun                                                          | OP     | Rp4.450.000,00 |
|     | o. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun                                                                            | OP     | Rp5.010.000,00 |
|     |                                                                                                                        |        |                |
|     | 1.2.2.3. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Nonkonstruksi) |        |                |
|     | a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi s.d. Rp50 juta                                                                | OP     | Rp450.000,00   |
|     | b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp50 juta s.d. Rp100 juta                                             | OP     | Rp450.000,00   |
|     | c. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d. Rp100 juta                                                                   | OP     | Rp450.000,00   |
|     | d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta                               | OP     | Rp480.000,00   |
|     | e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta                               | OP     | Rp600.000,00   |
|     | f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar                               | OP     | Rp720.000,00   |
|     | g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar                             | OP     | Rp910.000,00   |
|     | h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar                             | OP     | Rp1.090.000,00 |
|     | i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar                              | OP     | Rp1.270.000,00 |

j. Nilai . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 23 -

| NO       | URAIAN                                                                                      | SATUAN | BESARAN        |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|
| (1)      | (2)                                                                                         | (3)    | (4)            |
|          | j. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar   | OP     | Rp1.510.000,00 |
|          | k. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar   | OP     | Rp1.750.000,00 |
|          | l. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar   | OP     | Rp1.990.000,00 |
|          | m. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar  | OP     | Rp2.230.000,00 |
|          | n. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar | OP     | Rp2.560.000,00 |
|          | o. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar | OP     | Rp2.880.000,00 |
|          | p. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar | OP     | Rp3.200.000,00 |
|          | r. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun  | OP     | Rp3.520.000,00 |
|          | s. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp1 triliun                    | OP     | Rp3.960.000,00 |
|          |                                                                                             |        |                |
| 1.2.3.   | Honorarium Pengguna Anggaran                                                                |        |                |
| 1.2.3.1. | Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)                             |        |                |
|          | a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar                              | OP     | Rp3.580.000,00 |
|          | b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar                              | OP     | Rp4.030.000,00 |
|          | c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar                              | OP     | Rp4.490.000,00 |
|          | d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun                               | OP     | Rp4.940.000,00 |
|          | e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun                                                 | OP     | Rp5.560.000,00 |

1.2.3.2. Honorarium . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 24 -

| NO       | URAIAN                                                                                          | SATUAN | BESARAN        |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|
| (1)      | (2)                                                                                             | (3)    | (4)            |
| 1.2.3.2. | Honorarium Pengguna Anggaran<br>Pengadaan Barang (Non Konstruksi)                               |        |                |
| a.       | Nilai pagu pengadaan di atas Rp100<br>miliar s.d. Rp250 miliar                                  | OP     | Rp3.230.000,00 |
| b.       | Nilai pagu pengadaan di atas Rp250<br>miliar s.d. Rp500 miliar                                  | OP     | Rp3.640.000,00 |
| c.       | Nilai pagu pengadaan di atas Rp500<br>miliar s.d. Rp750 miliar                                  | OP     | Rp4.040.000,00 |
| d.       | Nilai pagu pengadaan di atas Rp750<br>miliar s.d. Rp1 triliun                                   | OP     | Rp4.450.000,00 |
| e.       | Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1<br>triliun                                                    | OP     | Rp5.010.000,00 |
| 1.2.3.3. | Honorarium Pengguna Anggaran<br>Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)                                 |        |                |
| a.       | Nilai pagu pengadaan jasa<br>konsultansi/jasa lainnya di atas Rp<br>10 miliar s.d. Rp25 miliar  | OP     | Rp1.510.000,00 |
| b.       | Nilai pagu pengadaan jasa<br>konsultansi/jasa lainnya di atas<br>Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar   | OP     | Rp1.750.000,00 |
| c.       | Nilai pagu pengadaan jasa<br>konsultansi/jasa lainnya di atas<br>Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar   | OP     | Rp1.990.000,00 |
| d.       | Nilai pagu pengadaan jasa<br>konsultansi/jasa lainnya di atas<br>Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar  | OP     | Rp2.230.000,00 |
| e.       | Nilai pagu pengadaan jasa<br>konsultansi/jasa lainnya di atas<br>Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar | OP     | Rp2.560.000,00 |
| f.       | Nilai pagu pengadaan jasa<br>konsultansi/jasa lainnya di atas<br>Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar | OP     | Rp2.880.000,00 |
| g.       | Nilai pagu pengadaan jasa<br>konsultansi/jasa lainnya di atas<br>Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar | OP     | Rp3.200.000,00 |
| h.       | Nilai pagu pengadaan jasa<br>konsultansi/jasa lainnya di atas<br>Rp750. miliar s.d. Rp1 triliun | OP     | Rp3.520.000,00 |
| i.       | Nilai pagu pengadaan jasa<br>konsultansi/jasa lainnya di atas Rp1<br>triliun                    | OP     | Rp3.960.000,00 |

1.3. HONORARIUM . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 25 -

| NO   | URAIAN                                                                                         | SATUAN | BESARAN        |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|
| (1)  | (2)                                                                                            | (3)    | (4)            |
| 1.3. | <b>HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA<br/>PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)</b>                   |        |                |
|      | 1.3.1. Kepala                                                                                  | OB     | Rp1.000.000,00 |
|      | 1.3.2. Sekretaris/Staf Pendukung                                                               | OB     | Rp750.000,00   |
| 1.4. | <b>HONORARIUM<br/>NARASUMBER/PEMBAHAS/MODERATOR/<br/>PEMBAWA ACARA/ PANITIA</b>                |        |                |
|      | 1.4.1. Honorarium Narasumber/ Pembahas                                                         |        |                |
|      | a. Menteri/Pejabat Setingkat<br>Menteri/Pejabat Negara Lainnya                                 | OJ     | Rp1.700.000,00 |
|      | b. Kepala Daerah/Pejabat Setingkat<br>Kepala Daerah/Pejabat Daerah<br>Lainnya yang disetarakan | OJ     | Rp1.400.000,00 |
|      | c. Pejabat Eselon I/ yang disetarakan                                                          | OJ     | Rp1.200.000,00 |
|      | d. Pejabat Eselon II /yang disetarakan                                                         | OJ     | Rp1.000.000,00 |
|      | e. Pejabat Eselon III ke bawah/yang<br>disetarakan                                             | OJ     | Rp900.000,00   |
|      | 1.4.2. Honorarium Moderator                                                                    | OK     | Rp700.000,00   |
|      | 1.4.3. Honorarium Pembawa Acara                                                                | OK     | Rp400.000,00   |
|      | 1.4.4. Honorarium Panitia                                                                      |        |                |
|      | a. Penanggung Jawab                                                                            | OK     | Rp450.000,00   |
|      | b. Ketua/Wakil ketua                                                                           | OK     | Rp400.000,00   |
|      | c. Sekretaris                                                                                  | OK     | Rp300.000,00   |
|      | d. Anggota                                                                                     | OK     | Rp300.000,00   |
| 1.5. | <b>HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN<br/>SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN</b>            |        |                |
|      | 1.5.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan                                                       |        |                |
|      | 1.5.1.1. Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah                                                    |        |                |
|      | a. Pengarah                                                                                    | OB     | Rp1.500.000,00 |
|      | b. Penanggung Jawab                                                                            | OB     | Rp1.250.000,00 |
|      | c. Ketua                                                                                       | OB     | Rp1.000.000,00 |
|      | d. Wakil ketua                                                                                 | OB     | Rp850.000,00   |
|      | e. Sekretaris                                                                                  | OB     | Rp750.000,00   |
|      | f. Anggota                                                                                     | OB     | Rp750.000,00   |

1.5.1.2. Yang ...



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 26 -

| NO          | URAIAN                                                                                                  | SATUAN | BESARAN        |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|
| (1)         | (2)                                                                                                     | (3)    | (4)            |
|             | <b>1.5.1.2. Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah</b>                                                  |        |                |
|             | a. Pengarah                                                                                             | OB     | Rp750.000,00   |
|             | b. Penanggung Jawab                                                                                     | OB     | Rp700.000,00   |
|             | c. Ketua                                                                                                | OB     | Rp650.000,00   |
|             | d. Wakil ketua                                                                                          | OB     | Rp600.000,00   |
|             | e. Sekretaris                                                                                           | OB     | Rp500.000,00   |
|             | f. Anggota                                                                                              | OB     | Rp500.000,00   |
|             | <b>1.5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan</b>                                             |        |                |
|             | <b>1.5.2.1. Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah</b>                                                  |        |                |
|             | a. Ketua/Wakil Ketua                                                                                    | OB     | Rp250.000,00   |
|             | b. Anggota                                                                                              | OB     | Rp220.000,00   |
|             |                                                                                                         |        |                |
| <b>1.6.</b> | <b>HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/SAKSI AHLI DAN BERACARA</b>                                       |        |                |
|             | 1.6.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli                                                    | OK     | Rp1.800.000,00 |
|             | 1.6.2. Honorarium Beracara                                                                              | OK     | Rp1.800.000,00 |
|             |                                                                                                         |        |                |
| <b>1.7.</b> | <b>HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL</b>                                                     |        |                |
|             | 1.7.1. SLTA                                                                                             | OB     | Rp2.100.000,00 |
|             | 1.7.2. DI/DII/DIII/Sarjana Terapan                                                                      | OB     | Rp2.400.000,00 |
|             | 1.7.3. Sarjana (S1)                                                                                     | OB     | Rp2.600.000,00 |
|             | 1.7.4. Master (S2)                                                                                      | OB     | Rp2.800.000,00 |
|             | 1.7.5. Doktor (S3)                                                                                      | OB     | Rp3.000.000,00 |
|             |                                                                                                         |        |                |
| <b>1.8.</b> | <b>HONORARIUM ROHANIWAN</b>                                                                             | OK     | Rp400.000,00   |
|             |                                                                                                         |        |                |
| <b>1.9.</b> | <b>HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/BULETIN/MAJALAH/PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/PENGELOLA WEBSITE</b> |        |                |
|             | <b>1.9.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal</b>                                                          |        |                |
|             | a. Penanggung Jawab                                                                                     | Oter   | Rp500.000,00   |
|             | b. Redaktur                                                                                             | Oter   | Rp400.000,00   |
|             | c. Penyunting/Editor                                                                                    | Oter   | Rp300.000,00   |

d. Desain . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 27 -

| NO      | URAIAN                                                         | SATUAN               | BESARAN      |
|---------|----------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|
| (1)     | (2)                                                            | (3)                  | (4)          |
|         | d. Desain Grafis                                               | Oter                 | Rp180.000,00 |
|         | e. Fotografer                                                  | Oter                 | Rp180.000,00 |
|         | f. Sekretariat                                                 | Oter                 | Rp150.000,00 |
|         | g. Pembuat Artikel                                             | Per Halaman          | Rp200.000,00 |
|         |                                                                |                      |              |
| 1.9.2.  | Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah                      |                      |              |
|         | a. Penanggung Jawab                                            | Oter                 | Rp400.000,00 |
|         | b. Redaktur                                                    | Oter                 | Rp300.000,00 |
|         | c. Penyunting/Editor                                           | Oter                 | Rp250.000,00 |
|         | d. Desain Grafis                                               | Oter                 | Rp180.000,00 |
|         | e. Fotografer                                                  | Oter                 | Rp180.000,00 |
|         | f. Sekretariat                                                 | Oter                 | Rp150.000,00 |
|         | g. Pembuat Artikel                                             | Per Halaman          | Rp100.000,00 |
|         |                                                                |                      |              |
| 1.9.3.  | Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website |                      |              |
|         | a. Penanggung Jawab                                            | OB                   | Rp500.000,00 |
|         | b. Redaktur                                                    | OB                   | Rp450.000,00 |
|         | c. Editor                                                      | OB                   | Rp400.000,00 |
|         | d. Web Admin                                                   | OB                   | Rp350.000,00 |
|         | e. Web Developer                                               | OB                   | Rp300.000,00 |
|         | f. Pembuat Artikel                                             | Per Halaman          | Rp100.000,00 |
|         |                                                                |                      |              |
| 1.10.   | HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN                                 |                      |              |
| 1.10.1. | Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar        |                      |              |
|         | a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian                           | Naskah/<br>Pelajaran | Rp150.000,00 |
|         | b. Pengawas Ujian                                              | OH                   | Rp240.000,00 |
|         | c. Pemeriksa Hasil Ujian                                       | Siswa/<br>Mata Ujian | Rp5.000,00   |

1.10.2. Honorarium . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 28 -

| NO      | URAIAN                                                                                  | SATUAN                  | BESARAN        |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|
| (1)     | (2)                                                                                     | (3)                     | (4)            |
| 1.10.2. | Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah                              |                         |                |
|         | a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian                                                    | Naskah/<br>Pelajaran    | Rp190.000,00   |
|         | b. Pengawas Ujian                                                                       | OH                      | Rp270.000,00   |
|         | c. Pemeriksa Hasil Ujian                                                                | Siswa/<br>Mata<br>Ujian | Rp7.500,00     |
| 1.11.   | HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA                         |                         |                |
| 1.11.1. | Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota                        | Per Butir<br>Soal       | Rp100.000,00   |
| 1.11.2. | Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota                            |                         |                |
|         | a. Telaah Materi Soal                                                                   | Per Butir<br>Soal       | Rp45.000,00    |
|         | b. Telaah Bahasa Soal                                                                   | Per Butir<br>Soal       | Rp20.000,00    |
| 1.12.   | HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)                   |                         |                |
| 1.12.1. | Honorarium Penceramah                                                                   | OJP                     | Rp1.000.000,00 |
| 1.12.2. | Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara  | OJP                     | Rp300.000,00   |
| 1.12.3. | Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara | OJP                     | Rp200.000,00   |
| 1.12.4. | Honorarium Penyusunan Modul Diklat                                                      | Per Modul               | Rp5.000.000,00 |
| 1.12.5. | Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat                                        |                         |                |
|         | a. Lama Diklat s.d. 5 hari:                                                             |                         |                |
|         | 1) Penanggung Jawab                                                                     | OK                      | Rp450.000,00   |
|         | 2) Ketua/Wakil ketua                                                                    | OK                      | Rp400.000,00   |
|         | 3) Sekretaris                                                                           | OK                      | Rp300.000,00   |
|         | 4) Anggota                                                                              | OK                      | Rp300.000,00   |
|         | b. Lama Diklat 6 s.d. 30 hari:                                                          |                         |                |
|         | 1) Penanggung Jawab                                                                     | OK                      | Rp675.000,00   |
|         | 2) Ketua/Wakil ketua                                                                    | OK                      | Rp600.000,00   |

3) Sekretaris . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 29 -

| NO    | URAIAN                                                        | SATUAN | BESARAN        |
|-------|---------------------------------------------------------------|--------|----------------|
| (1)   | (2)                                                           | (3)    | (4)            |
|       | 3) Sekretaris                                                 | OK     | Rp450.000,00   |
|       | 4) Anggota                                                    | OK     | Rp450.000,00   |
|       | c. Lama Diklat lebih dari 30 hari:                            |        |                |
|       | 1) Penanggung Jawab                                           | OK     | Rp900.000,00   |
|       | 2) Ketua/Wakil ketua                                          | OK     | Rp800.000,00   |
|       | 3) Sekretaris                                                 | OK     | Rp600.000,00   |
|       | 4) Anggota                                                    | OK     | Rp600.000,00   |
| 1.13. | HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH                     |        |                |
|       | 1.13.1. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah             |        |                |
|       | a. Pembina                                                    | OB     | Rp3.500.000,00 |
|       | b. Pengarah                                                   | QB     | Rp3.000.000,00 |
|       | c. Ketua                                                      | OB     | Rp2.500.000,00 |
|       | d. Wakil Ketua                                                | OB     | Rp2.000.000,00 |
|       | e. Sekretaris                                                 | OB     | Rp1.500.000,00 |
|       | f. Anggota                                                    | OB     | Rp1.300.000,00 |
|       | 1.13.2. Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah |        |                |
|       | a. Ketua                                                      | OB     | Rp1.000.000,00 |
|       | b. Sekretaris                                                 | OB     | Rp900.000,00   |
|       | c. Anggota                                                    | OB     | Rp600.000,00   |

**2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI**

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah.

Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;

c. pengumandahan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 30 -

- c. pengumandahan (*detasering*);
- d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
- h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan
- i. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

- a. uang harian;
- b. biaya transport;
- c. biaya penginapan; dan
- d. uang representasi perjalanan dinas.

Ketentuan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 31 -

Ketentuan Lampiran I Peraturan Presiden ini mengatur komponen perjalanan dinas yang meliputi:

1. uang harian;
2. uang representasi; dan
3. biaya penginapan.

Sedangkan komponen biaya transport diatur dalam Lampiran II Peraturan Presiden ini.

**a. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN UANG REPRESENTASI.**

**1. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri**

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri lebih dari 8 (delapan) jam. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas di dalam negeri yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2. . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

TABEL 1.2  
UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

| NO. | PROVINSI            | SATUAN | LUAR KOTA    | DALAM KOTA<br>LEBIH DARI 8<br>(DELAPAN)<br>JAM | DIKLAT       |
|-----|---------------------|--------|--------------|------------------------------------------------|--------------|
| (1) | (2)                 | (3)    | (4)          | (5)                                            | (6)          |
| 1.  | ACEH                | OH     | Rp360.000,00 | Rp140.000,00                                   | Rp110.000,00 |
| 2.  | SUMATERA UTARA      | OH     | Rp370.000,00 | Rp150.000,00                                   | Rp110.000,00 |
| 3.  | RIAU                | OH     | Rp370.000,00 | Rp150.000,00                                   | Rp110.000,00 |
| 4.  | KEPULAUAN RIAU      | OH     | Rp370.000,00 | Rp150.000,00                                   | Rp110.000,00 |
| 5.  | JAMBI               | OH     | Rp370.000,00 | Rp150.000,00                                   | Rp110.000,00 |
| 6.  | SUMATERA BARAT      | OH     | Rp380.000,00 | Rp150.000,00                                   | Rp110.000,00 |
| 7.  | SUMATERA SELATAN    | OH     | Rp380.000,00 | Rp150.000,00                                   | Rp110.000,00 |
| 8.  | LAMPUNG             | OH     | Rp380.000,00 | Rp150.000,00                                   | Rp110.000,00 |
| 9.  | BENGKULU            | OH     | Rp380.000,00 | Rp150.000,00                                   | Rp110.000,00 |
| 10. | BANGKA BELITUNG     | OH     | Rp410.000,00 | Rp160.000,00                                   | Rp120.000,00 |
| 11. | BANTEN              | OH     | Rp370.000,00 | Rp150.000,00                                   | Rp110.000,00 |
| 12. | JAWA BARAT          | OH     | Rp430.000,00 | Rp170.000,00                                   | Rp130.000,00 |
| 13. | D.K.I. JAKARTA      | OH     | Rp530.000,00 | Rp210.000,00                                   | Rp160.000,00 |
| 14. | JAWA TENGAH         | OH     | Rp370.000,00 | Rp150.000,00                                   | Rp110.000,00 |
| 15. | D.I. YOGYAKARTA     | OH     | Rp420.000,00 | Rp170.000,00                                   | Rp130.000,00 |
| 16. | JAWA TIMUR          | OH     | Rp410.000,00 | Rp160.000,00                                   | Rp120.000,00 |
| 17. | BALI                | OH     | Rp480.000,00 | Rp190.000,00                                   | Rp140.000,00 |
| 18. | NUSA TENGGARA BARAT | OH     | Rp440.000,00 | Rp180.000,00                                   | Rp130.000,00 |
| 19. | NUSA TENGGARA TIMUR | OH     | Rp430.000,00 | Rp170.000,00                                   | Rp130.000,00 |
| 20. | KALIMANTAN BARAT    | OH     | Rp380.000,00 | Rp150.000,00                                   | Rp110.000,00 |
| 21. | KALIMANTAN TENGAH   | OH     | Rp360.000,00 | Rp140.000,00                                   | Rp110.000,00 |
| 22. | KALIMANTAN SELATAN  | OH     | Rp380.000,00 | Rp150.000,00                                   | Rp110.000,00 |
| 23. | KALIMANTAN TIMUR    | OH     | Rp430.000,00 | Rp170.000,00                                   | Rp130.000,00 |
| 24. | KALIMANTAN UTARA    | OH     | Rp430.000,00 | Rp170.000,00                                   | Rp130.000,00 |
| 25. | SULAWESI UTARA      | OH     | Rp370.000,00 | Rp150.000,00                                   | Rp110.000,00 |
| 26. | GORONTALO           | OH     | Rp370.000,00 | Rp150.000,00                                   | Rp110.000,00 |
| 27. | SULAWESI BARAT      | OH     | Rp410.000,00 | Rp160.000,00                                   | Rp120.000,00 |
| 28. | SULAWESI SELATAN    | OH     | Rp430.000,00 | Rp170.000,00                                   | Rp130.000,00 |
| 29. | SULAWESI TENGAH     | OH     | Rp370.000,00 | Rp150.000,00                                   | Rp110.000,00 |
| 30. | SULAWESI TENGGARA   | OH     | Rp380.000,00 | Rp150.000,00                                   | Rp110.000,00 |

31. MALUKU . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

| NO. | PROVINSI     | SATUAN | LUAR KOTA    | DALAM KOTA<br>LEBIH DARI 8<br>(DELAPAN)<br>JAM | DIKLAT       |
|-----|--------------|--------|--------------|------------------------------------------------|--------------|
| (1) | (2)          | (3)    | (4)          | (5)                                            | (6)          |
| 31. | MALUKU       | OH     | Rp380.000,00 | Rp150.000,00                                   | Rp110.000,00 |
| 32. | MALUKU UTARA | OH     | Rp430.000,00 | Rp170.000,00                                   | Rp130.000,00 |
| 33. | PAPUA        | OH     | Rp580.000,00 | Rp230.000,00                                   | Rp170.000,00 |
| 34. | PAPUA BARAT  | OH     | Rp480.000,00 | Rp190.000,00                                   | Rp140.000,00 |

2. Uang Representasi Perjalanan Dinas

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara *lumpsum*.

Satuan Biaya Uang Representasi terinci pada Tabel 1.3.

TABEL 1.3  
UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

| NO. | URAIAN                         | SATUAN | LUAR KOTA    | DALAM KOTA<br>LEBIH DARI 8<br>(DELAPAN) JAM |
|-----|--------------------------------|--------|--------------|---------------------------------------------|
| (1) | (2)                            | (3)    | (4)          | (5)                                         |
| 1.  | PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH | OH     | Rp250.000,00 | Rp125.000,00                                |
| 2.  | PEJABAT ESELON I               | OH     | Rp200.000,00 | Rp100.000,00                                |
| 3.  | PEJABAT ESELON II              | OH     | Rp150.000,00 | Rp75.000,00                                 |

b. SATUAN . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 34 -

**b. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI**

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Adapun, Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 1.4.

**TABEL 1.4  
SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI**

| NO. | PROVINSI         | SATUAN | TARIF HOTEL                                   |                                  |                                  |                                  |               |
|-----|------------------|--------|-----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------|
|     |                  |        | KEPALA DAERAH / KETUA DPRD / PEJABAT ESELON I | ANGGOTA DPRD / PEJABAT ESELON II | PEJABAT ESELON III / GOLONGAN IV | PEJABAT ESELON IV / GOLONGAN III | GOLONGAN I/II |
| (1) | (2)              | (3)    | (4)                                           | (5)                              | (6)                              | (7)                              | (8)           |
| 1.  | ACEH             | OH     | Rp4.420.000,00                                | Rp3.526.000,00                   | Rp1.294.000,00                   | Rp556.000,00                     | Rp556.000,00  |
| 2.  | SUMATERA UTARA   | OH     | Rp4.960.000,00                                | Rp1.518.000,00                   | Rp1.100.000,00                   | Rp530.000,00                     | Rp530.000,00  |
| 3.  | RIAU             | OH     | Rp3.820.000,00                                | Rp3.119.000,00                   | Rp1.650.000,00                   | Rp852.000,00                     | Rp852.000,00  |
| 4.  | KEPULAUAN RIAU   | OH     | Rp4.275.000,00                                | Rp1.854.000,00                   | Rp1.037.000,00                   | Rp792.000,00                     | Rp792.000,00  |
| 5.  | JAMBI            | OH     | Rp4.000.000,00                                | Rp3.337.000,00                   | Rp1.212.000,00                   | Rp580.000,00                     | Rp580.000,00  |
| 6.  | SUMATERA BARAT   | OH     | Rp5.236.000,00                                | Rp3.332.000,00                   | Rp1.353.000,00                   | Rp650.000,00                     | Rp650.000,00  |
| 7.  | SUMATERA SELATAN | OH     | Rp5.850.000,00                                | Rp3.083.000,00                   | Rp1.571.000,00                   | Rp861.000,00                     | Rp861.000,00  |
| 8.  | LAMPUNG          | OH     | Rp4.491.000,00                                | Rp2.067.000,00                   | Rp1.140.000,00                   | Rp580.000,00                     | Rp580.000,00  |
| 9.  | BENGKULU         | OH     | Rp2.071.000,00                                | Rp1.628.000,00                   | Rp1.546.000,00                   | Rp630.000,00                     | Rp630.000,00  |
| 10. | BANGKA BELITUNG  | OH     | Rp3.827.000,00                                | Rp2.838.000,00                   | Rp1.957.000,00                   | Rp622.000,00                     | Rp622.000,00  |
| 11. | BANTEN           | OH     | Rp5.725.000,00                                | Rp2.373.000,00                   | Rp1.000.000,00                   | Rp718.000,00                     | Rp718.000,00  |

12. JAWA BARAT . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 35 -

| NO. | PROVINSI                  | SATUAN | TARIF HOTEL                                              |                                          |                                       |                                       |                  |
|-----|---------------------------|--------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------|
|     |                           |        | KEPALA<br>DAERAH /<br>KETUA DPRD/<br>PEJABAT<br>ESELON I | ANGGOTA<br>DPRD/<br>PEJABAT<br>ESELON II | PEJABAT<br>ESELON III/<br>GOLONGAN IV | PEJABAT<br>ESELON IV/<br>GOLONGAN III | GOLONGAN<br>I/II |
| (1) | (2)                       | (3)    | (4)                                                      | (5)                                      | (6)                                   | (7)                                   | (8)              |
| 12. | JAWA BARAT                | OH     | Rp5.381.000,00                                           | Rp2.755.000,00                           | Rp1.006.000,00                        | Rp570.000,00                          | Rp570.000,00     |
| 13. | D.K.I.<br>JAKARTA         | OH     | Rp5.850.000,00                                           | Rp1.490.000,00                           | Rp992.000,00                          | Rp730.000,00                          | Rp730.000,00     |
| 14. | JAWA<br>TENGAH            | OH     | Rp4.242.000,00                                           | Rp1.480.000,00                           | Rp954.000,00                          | Rp600.000,00                          | Rp600.000,00     |
| 15. | D.I.<br>YOGYAKARTA        | OH     | Rp5.017.000,00                                           | Rp2.695.000,00                           | Rp1.384.000,00                        | Rp845.000,00                          | Rp845.000,00     |
| 16. | JAWA TIMUR                | OH     | Rp4.400.000,00                                           | Rp1.605.000,00                           | Rp1.076.000,00                        | Rp664.000,00                          | Rp664.000,00     |
| 17. | BALI                      | OH     | Rp4.890.000,00                                           | Rp1.946.000,00                           | Rp990.000,00                          | Rp910.000,00                          | Rp910.000,00     |
| 18. | NUSA<br>TENGGARA<br>BARAT | OH     | Rp3.500.000,00                                           | Rp2.648.000,00                           | Rp1.418.000,00                        | Rp580.000,00                          | Rp580.000,00     |
| 19. | NUSA<br>TENGGARA<br>TIMUR | OH     | Rp3.000.000,00                                           | Rp1.493.000,00                           | Rp1.355.000,00                        | Rp550.000,00                          | Rp550.000,00     |
| 20. | KALIMANTAN<br>BARAT       | OH     | Rp2.654.000,00                                           | Rp1.538.000,00                           | Rp1.125.000,00                        | Rp538.000,00                          | Rp538.000,00     |
| 21. | KALIMANTAN<br>TENGAH      | OH     | Rp4.901.000,00                                           | Rp3.391.000,00                           | Rp1.160.000,00                        | Rp659.000,00                          | Rp659.000,00     |
| 22. | KALIMANTAN<br>SELATAN     | OH     | Rp4.797.000,00                                           | Rp3.316.000,00                           | Rp1.500.000,00                        | Rp540.000,00                          | Rp540.000,00     |
| 23. | KALIMANTAN<br>TIMUR       | OH     | Rp4.000.000,00                                           | Rp2.188.000,00                           | Rp1.507.000,00                        | Rp804.000,00                          | Rp804.000,00     |
| 24. | KALIMANTAN<br>UTARA       | OH     | Rp4.000.000,00                                           | Rp2.188.000,00                           | Rp1.507.000,00                        | Rp804.000,00                          | Rp804.000,00     |
| 25. | SULAWESI<br>UTARA         | OH     | Rp4.919.000,00                                           | Rp2.290.000,00                           | Rp924.000,00                          | Rp782.000,00                          | Rp782.000,00     |
| 26. | GORONTALO                 | OH     | Rp4.168.000,00                                           | Rp2.549.000,00                           | Rp1.431.000,00                        | Rp764.000,00                          | Rp764.000,00     |

27. SULAWESI BARAT . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

| NO. | PROVINSI               | SATUAN | TARIF HOTEL                                              |                                          |                                       |                                       |                  |
|-----|------------------------|--------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------|
|     |                        |        | KEPALA<br>DAERAH /<br>KETUA DPRD/<br>PEJABAT<br>ESELON I | ANGGOTA<br>DPRD/<br>PEJABAT<br>ESELON II | PEJABAT<br>ESELON III/<br>GOLONGAN IV | PEJABAT<br>ESELON IV/<br>GOLONGAN III | GOLONGAN<br>I/II |
| (1) | (2)                    | (3)    | (4)                                                      | (5)                                      | (6)                                   | (7)                                   | (8)              |
| 27. | SULAWESI<br>BARAT      | OH     | Rp4.076.000,00                                           | Rp2.581.000,00                           | Rp1.075.000,00                        | Rp704.000,00                          | Rp704.000,00     |
| 28. | SULAWESI<br>SELATAN    | OH     | Rp4.820.000,00                                           | Rp1.550.000,00                           | Rp1.020.000,00                        | Rp732.000,00                          | Rp732.000,00     |
| 29. | SULAWESI<br>TENGAH     | OH     | Rp2.309.000,00                                           | Rp2.027.000,00                           | Rp1.567.000,00                        | Rp951.000,00                          | Rp951.000,00     |
| 30. | SULAWESI<br>TENGGAHARA | OH     | Rp2.475.000,00                                           | Rp2.059.000,00                           | Rp1.297.000,00                        | Rp786.000,00                          | Rp786.000,00     |
| 31. | MALUKU                 | OH     | Rp3.467.000,00                                           | Rp3.240.000,00                           | Rp1.048.000,00                        | Rp667.000,00                          | Rp667.000,00     |
| 32. | MALUKU<br>UTARA        | OH     | Rp3.440.000,00                                           | Rp3.175.000,00                           | Rp1.073.000,00                        | Rp600.000,00                          | Rp600.000,00     |
| 33. | PAPUA                  | OH     | Rp3.859.000,00                                           | Rp3.318.000,00                           | Rp2.521.000,00                        | Rp829.000,00                          | Rp829.000,00     |
| 34. | PAPUA<br>BARAT         | OH     | Rp3.872.000,00                                           | Rp3.212.000,00                           | Rp2.056.000,00                        | Rp718.000,00                          | Rp718.000,00     |

Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara *lumpsum* sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

### 3. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

#### 3.1. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

Satuan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

a. paket *Fullboard*

Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.

Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

b. paket *Fullday*

Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

c. paket *Halfday*

Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

d. paket *Residence*

Satuan biaya paket *residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:
  - 1) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
  - 2) untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang; dan
- b. dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard*, *fullday*, *halfday*, dan *residence*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor terinci pada Tabel 1.5 dan Tabel 1.6.

TABEL 1.5

SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR SETINGKAT  
KEPALA DAERAH ATAU ESELON I

| NO. | PROVINSI          | SATUAN | HALFDAY       | FULLDAY       | FULLBOARD       | RESIDENCE     |
|-----|-------------------|--------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| (1) | (2)               | (3)    | (4)           | (5)           | (6)             | (7)           |
| 1.  | ACEH              | OP     | Rp 346.000,00 | Rp 403.000,00 | Rp 1.075.000,00 | Rp 749.000,00 |
| 2.  | SUMATERA<br>UTARA | OP     | Rp 276.000,00 | Rp 365.000,00 | Rp 800.000,00   | Rp 641.000,00 |
| 3.  | RIAU              | OP     | Rp 225.000,00 | Rp 335.000,00 | Rp 690.000,00   | Rp 560.000,00 |

4. KEPULAUAN RIAU . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 39 -

| NO. | PROVINSI            | SATUAN | HALFDAY       | FULLDAY       | FULLBOARD       | RESIDENCE     |
|-----|---------------------|--------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| (1) | (2)                 | (3)    | (4)           | (5)           | (6)             | (7)           |
| 4.  | KEPULAUAN RIAU      | OP     | Rp 230.000,00 | Rp 360.000,00 | Rp 790.000,00   | Rp 590.000,00 |
| 5.  | JAMBI               | OP     | Rp 271.000,00 | Rp 364.000,00 | Rp 1.008.000,00 | Rp 635.000,00 |
| 6.  | SUMATERA BARAT      | OP     | Rp 245.000,00 | Rp 310.000,00 | Rp 987.000,00   | Rp 555.000,00 |
| 7.  | SUMATERA SELATAN    | OP     | Rp 268.000,00 | Rp 384.000,00 | Rp 860.000,00   | Rp 652.000,00 |
| 8.  | LAMPUNG             | OP     | Rp 261.000,00 | Rp 373.000,00 | Rp 836.000,00   | Rp 634.000,00 |
| 9.  | BENGKULU            | OP     | Rp 250.000,00 | Rp 373.000,00 | Rp 973.000,00   | Rp 623.000,00 |
| 10. | BANGKA BELITUNG     | OP     | Rp 305.000,00 | Rp 400.000,00 | Rp 925.000,00   | Rp 705.000,00 |
| 11. | BANTEN              | OP     | Rp 395.000,00 | Rp 468.000,00 | Rp 919.000,00   | Rp 863.000,00 |
| 12. | JAWA BARAT          | OP     | Rp 426.000,00 | Rp 530.000,00 | Rp 1.110.000,00 | Rp 956.000,00 |
| 13. | D.K.I. JAKARTA      | OP     | Rp 433.000,00 | Rp 510.000,00 | Rp 1.216.000,00 | Rp 943.000,00 |
| 14. | JAWA TENGAH         | OP     | Rp 232.000,00 | Rp 309.000,00 | Rp 749.000,00   | Rp 541.000,00 |
| 15. | D.I. YOGYAKARTA     | OP     | Rp 250.000,00 | Rp 405.000,00 | Rp 963.000,00   | Rp 655.000,00 |
| 16. | JAWA TIMUR          | OP     | Rp 357.000,00 | Rp 406.000,00 | Rp 1.784.000,00 | Rp 763.000,00 |
| 17. | BALI                | OP     | Rp 375.000,00 | Rp 490.000,00 | Rp 1.500.000,00 | Rp 865.000,00 |
| 18. | NUSA TENGGARA BARAT | OP     | Rp 368.000,00 | Rp 530.000,00 | Rp 1.001.000,00 | Rp 898.000,00 |
| 19. | NUSA TENGGARA TIMUR | OP     | Rp 308.000,00 | Rp 388.000,00 | Rp 1.088.000,00 | Rp 696.000,00 |
| 20. | KALIMANTAN BARAT    | OP     | Rp 337.000,00 | Rp 400.000,00 | Rp 810.000,00   | Rp 737.000,00 |
| 21. | KALIMANTAN TENGAH   | OP     | Rp 317.000,00 | Rp 487.000,00 | Rp 1.267.000,00 | Rp 804.000,00 |
| 22. | KALIMANTAN SELATAN  | OP     | Rp 264.000,00 | Rp 360.000,00 | Rp 930.000,00   | Rp 624.000,00 |
| 23. | KALIMANTAN TIMUR    | OP     | Rp 274.000,00 | Rp 365.000,00 | Rp 863.000,00   | Rp 639.000,00 |
| 24. | KALIMANTAN UTARA    | OP     | Rp 274.000,00 | Rp 350.000,00 | Rp 848.000,00   | Rp 624.000,00 |
| 25. | SULAWESI UTARA      | OP     | Rp 273.000,00 | Rp 350.000,00 | Rp 870.000,00   | Rp 623.000,00 |

26. GORONTALO . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 40 -

| NO. | PROVINSI          | SATUAN | HALFDAY       | FULLDAY       | FULLBOARD       | RESIDENCE     |
|-----|-------------------|--------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| (1) | (2)               | (3)    | (4)           | (5)           | (6)             | (7)           |
| 26. | GORONTALO         | OP     | Rp 215.000,00 | Rp 393.000,00 | Rp 1.338.000,00 | Rp 608.000,00 |
| 27. | SULAWESI BARAT    | OP     | Rp 264.000,00 | Rp 382.000,00 | Rp 856.000,00   | Rp 646.000,00 |
| 28. | SULAWESI SELATAN  | OP     | Rp 290.000,00 | Rp 410.000,00 | Rp 1.574.000,00 | Rp 700.000,00 |
| 29. | SULAWESI TENGAH   | OP     | Rp 283.000,00 | Rp 389.000,00 | Rp 1.013.000,00 | Rp 672.000,00 |
| 30. | SULAWESI TENGGARA | OP     | Rp 237.000,00 | Rp 350.000,00 | Rp 800.000,00   | Rp 587.000,00 |
| 31. | MALUKU            | OP     | Rp 306.000,00 | Rp 454.000,00 | Rp 1.300.000,00 | Rp 760.000,00 |
| 32. | MALUKU UTARA      | OP     | Rp 316.000,00 | Rp 498.000,00 | Rp 850.000,00   | Rp 814.000,00 |
| 33. | PAPUA             | OP     | Rp 318.000,00 | Rp 536.000,00 | Rp 1.863.000,00 | Rp 854.000,00 |
| 34. | PAPUA BARAT       | OP     | Rp 292.000,00 | Rp 526.000,00 | Rp 1.752.000,00 | Rp 818.000,00 |

**TABEL 1.6**

**SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR  
SETINGKAT ESELON II**

| NO. | PROVINSI         | SATUAN | HALFDAY       | FULLDAY       | FULLBOARD     | RESIDENCE     |
|-----|------------------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| (1) | (2)              | (3)    | (4)           | (5)           | (6)           | (7)           |
| 1.  | ACEH             | OP     | Rp 300.000,00 | Rp 330.000,00 | Rp 772.000,00 | Rp 630.000,00 |
| 2.  | SUMATERA UTARA   | OP     | Rp 178.000,00 | Rp 275.000,00 | Rp 746.000,00 | Rp 453.000,00 |
| 3.  | RIAU             | OP     | Rp 185.000,00 | Rp 245.000,00 | Rp 591.000,00 | Rp 430.000,00 |
| 4.  | KEPULAUAN RIAU   | OP     | Rp 227.000,00 | Rp 273.000,00 | Rp 625.000,00 | Rp 500.000,00 |
| 5.  | JAMBI            | OP     | Rp 215.000,00 | Rp 301.000,00 | Rp 840.000,00 | Rp 516.000,00 |
| 6.  | SUMATERA BARAT   | OP     | Rp 173.000,00 | Rp 240.000,00 | Rp 663.000,00 | Rp 413.000,00 |
| 7.  | SUMATERA SELATAN | OP     | Rp 218.000,00 | Rp 293.000,00 | Rp 745.000,00 | Rp 511.000,00 |
| 8.  | LAMPUNG          | OP     | Rp 216.000,00 | Rp 270.000,00 | Rp 640.000,00 | Rp 486.000,00 |
| 9.  | BENGKULU         | OP     | Rp 214.000,00 | Rp 284.000,00 | Rp 912.000,00 | Rp 498.000,00 |
| 10. | BANGKA BELITUNG  | OP     | Rp 299.000,00 | Rp 385.000,00 | Rp 804.000,00 | Rp 684.000,00 |
| 11. | BANTEN           | OP     | Rp 275.000,00 | Rp 354.000,00 | Rp 837.000,00 | Rp 629.000,00 |

12. JAWA BARAT . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 41 -

| NO. | PROVINSI               | SATUAN | HALFDAY       | FULLDAY       | FULLBOARD       | RESIDENCE     |
|-----|------------------------|--------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| (1) | (2)                    | (3)    | (4)           | (5)           | (6)             | (7)           |
| 12. | JAWA BARAT             | OP     | Rp 331.000,00 | Rp 398.000,00 | Rp 822.000,00   | Rp 729.000,00 |
| 13. | D.K.I. JAKARTA         | OP     | Rp 354.000,00 | Rp 433.000,00 | Rp 1.197.000,00 | Rp 787.000,00 |
| 14. | JAWA TENGAH            | OP     | Rp 191.000,00 | Rp 263.000,00 | Rp 675.000,00   | Rp 454.000,00 |
| 15. | D.I. YOGYAKARTA        | OP     | Rp 210.000,00 | Rp 310.000,00 | Rp 750.000,00   | Rp 520.000,00 |
| 16. | JAWA TIMUR             | OP     | Rp 338.000,00 | Rp 395.000,00 | Rp 1.352.000,00 | Rp 733.000,00 |
| 17. | BALI                   | OP     | Rp 330.000,00 | Rp 441.000,00 | Rp 1.182.000,00 | Rp 771.000,00 |
| 18. | NUSA TENGGARA<br>BARAT | OP     | Rp 280.000,00 | Rp 420.000,00 | Rp 764.000,00   | Rp 700.000,00 |
| 19. | NUSA TENGGARA<br>TIMUR | OP     | Rp 271.000,00 | Rp 377.000,00 | Rp 825.000,00   | Rp 648.000,00 |
| 20. | KALIMANTAN<br>BARAT    | OP     | Rp 250.000,00 | Rp 331.000,00 | Rp 664.000,00   | Rp 581.000,00 |
| 21. | KALIMANTAN<br>TENGAH   | OP     | Rp 242.000,00 | Rp 340.000,00 | Rp 1.031.000,00 | Rp 582.000,00 |
| 22. | KALIMANTAN<br>SELATAN  | OP     | Rp 194.000,00 | Rp 295.000,00 | Rp 734.000,00   | Rp 489.000,00 |
| 23. | KALIMANTAN<br>TIMUR    | OP     | Rp 207.000,00 | Rp 302.000,00 | Rp 750.000,00   | Rp 509.000,00 |
| 24. | KALIMANTAN<br>UTARA    | OP     | Rp 207.000,00 | Rp 302.000,00 | Rp 750.000,00   | Rp 509.000,00 |
| 25. | SULAWESI UTARA         | OP     | Rp 185.000,00 | Rp 270.000,00 | Rp 737.000,00   | Rp 455.000,00 |
| 26. | GORONTALO              | OP     | Rp 175.000,00 | Rp 250.000,00 | Rp 1.299.000,00 | Rp 425.000,00 |
| 27. | SULAWESI BARAT         | OP     | Rp 235.000,00 | Rp 323.000,00 | Rp 792.000,00   | Rp 558.000,00 |
| 28. | SULAWESI<br>SELATAN    | OP     | Rp 206.000,00 | Rp 320.000,00 | Rp 1.127.000,00 | Rp 526.000,00 |
| 29. | SULAWESI<br>TENGAH     | OP     | Rp 234.000,00 | Rp 385.000,00 | Rp 738.000,00   | Rp 619.000,00 |
| 30. | SULAWESI<br>TENGGARA   | OP     | Rp 195.000,00 | Rp 295.000,00 | Rp 688.000,00   | Rp 490.000,00 |
| 31. | MALUKU                 | OP     | Rp 253.000,00 | Rp 346.000,00 | Rp 724.000,00   | Rp 599.000,00 |
| 32. | MALUKU UTARA           | OP     | Rp 169.000,00 | Rp 354.000,00 | Rp 669.000,00   | Rp 523.000,00 |
| 33. | PAPUA                  | OP     | Rp 293.000,00 | Rp 478.000,00 | Rp 990.000,00   | Rp 771.000,00 |
| 34. | PAPUA BARAT            | OP     | Rp 284.000,00 | Rp 421.000,00 | Rp 1.120.000,00 | Rp 705.000,00 |

3.2. Uang . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 42 -

**3.2. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor**

Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan *fullboard*, kegiatan *fullday*, kegiatan *halfday*, atau kegiatan *residence* terinci pada Tabel 1.7.

Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

**TABEL 1.7**

**UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR**

| NO. | PROVINSI            | SATUAN | FULLBOARD<br>DI LUAR<br>KOTA | FULLBOARD<br>DI DALAM<br>KOTA | FULLDAY/<br>HALFDAY DI<br>DALAM KOTA | RESIDENCE DI<br>DALAM KOTA |
|-----|---------------------|--------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| (1) | (2)                 | (3)    | (4)                          | (5)                           | (6)                                  | (7)                        |
| 1.  | ACEH                | OH     | Rp120.000,00                 | Rp120.000,00                  | Rp85.000,00                          | Rp120.000,00               |
| 2.  | SUMATERA UTARA      | OH     | Rp130.000,00                 | Rp130.000,00                  | Rp95.000,00                          | Rp130.000,00               |
| 3.  | RIAU                | OH     | Rp130.000,00                 | Rp130.000,00                  | Rp85.000,00                          | Rp130.000,00               |
| 4.  | KEPULAUAN RIAU      | OH     | Rp130.000,00                 | Rp130.000,00                  | Rp95.000,00                          | Rp130.000,00               |
| 5.  | JAMBI               | OH     | Rp130.000,00                 | Rp130.000,00                  | Rp95.000,00                          | Rp130.000,00               |
| 6.  | SUMATERA BARAT      | OH     | Rp120.000,00                 | Rp120.000,00                  | Rp85.000,00                          | Rp120.000,00               |
| 7.  | SUMATERA<br>SELATAN | OH     | Rp120.000,00                 | Rp120.000,00                  | Rp85.000,00                          | Rp120.000,00               |
| 8.  | LAMPUNG             | OH     | Rp130.000,00                 | Rp130.000,00                  | Rp95.000,00                          | Rp130.000,00               |
| 9.  | BENGKULU            | OH     | Rp130.000,00                 | Rp130.000,00                  | Rp95.000,00                          | Rp130.000,00               |
| 10. | BANGKA BELITUNG     | OH     | Rp130.000,00                 | Rp130.000,00                  | Rp95.000,00                          | Rp130.000,00               |
| 11. | BANTEN              | OH     | Rp120.000,00                 | Rp120.000,00                  | Rp85.000,00                          | Rp120.000,00               |
| 12. | JAWA BARAT          | OH     | Rp150.000,00                 | Rp150.000,00                  | Rp105.000,00                         | Rp150.000,00               |
| 13. | D.K.I. JAKARTA      | OH     | Rp180.000,00                 | Rp180.000,00                  | Rp130.000,00                         | Rp180.000,00               |

14. JAWA TENGAH . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 43 -

| NO. | PROVINSI               | SATUAN | FULLBOARD<br>DI LUAR<br>KOTA | FULLBOARD<br>DI DALAM<br>KOTA | FULLDAY/<br>HALFDAY DI<br>DALAM KOTA | RESIDENCE DI<br>DALAM KOTA |
|-----|------------------------|--------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| (1) | (2)                    | (3)    | (4)                          | (5)                           | (6)                                  | (7)                        |
| 14. | JAWA TENGAH            | OH     | Rp130.000,00                 | Rp130.000,00                  | Rp95.000,00                          | Rp130.000,00               |
| 15. | D.I. YOGYAKARTA        | OH     | Rp140.000,00                 | Rp140.000,00                  | Rp100.000,00                         | Rp140.000,00               |
| 16. | JAWA TIMUR             | OH     | Rp140.000,00                 | Rp140.000,00                  | Rp100.000,00                         | Rp140.000,00               |
| 17. | BALI                   | OH     | Rp160.000,00                 | Rp160.000,00                  | Rp115.000,00                         | Rp160.000,00               |
| 18. | NUSA TENGGARA<br>BARAT | OH     | Rp150.000,00                 | Rp150.000,00                  | Rp105.000,00                         | Rp150.000,00               |
| 19. | NUSA TENGGARA<br>TIMUR | OH     | Rp140.000,00                 | Rp140.000,00                  | Rp100.000,00                         | Rp140.000,00               |
| 20. | KALIMANTAN<br>BARAT    | OH     | Rp130.000,00                 | Rp130.000,00                  | Rp95.000,00                          | Rp130.000,00               |
| 21. | KALIMANTAN<br>TENGAH   | OH     | Rp120.000,00                 | Rp120.000,00                  | Rp85.000,00                          | Rp120.000,00               |
| 22. | KALIMANTAN<br>SELATAN  | OH     | Rp130.000,00                 | Rp130.000,00                  | Rp95.000,00                          | Rp130.000,00               |
| 23. | KALIMANTAN<br>TIMUR    | OH     | Rp150.000,00                 | Rp150.000,00                  | Rp105.000,00                         | Rp150.000,00               |
| 24. | KALIMANTAN<br>UTARA    | OH     | Rp150.000,00                 | Rp150.000,00                  | Rp105.000,00                         | Rp150.000,00               |
| 25. | SULAWESI UTARA         | OH     | Rp130.000,00                 | Rp130.000,00                  | Rp95.000,00                          | Rp130.000,00               |
| 26. | GORONTALO              | OH     | Rp130.000,00                 | Rp130.000,00                  | Rp95.000,00                          | Rp130.000,00               |
| 27. | SULAWESI BARAT         | OH     | Rp120.000,00                 | Rp120.000,00                  | Rp85.000,00                          | Rp120.000,00               |
| 28. | SULAWESI<br>SELATAN    | OH     | Rp150.000,00                 | Rp150.000,00                  | Rp105.000,00                         | Rp150.000,00               |
| 29. | SULAWESI<br>TENGAH     | OH     | Rp130.000,00                 | Rp130.000,00                  | Rp95.000,00                          | Rp130.000,00               |
| 30. | SULAWESI<br>TENGGARA   | OH     | Rp130.000,00                 | Rp130.000,00                  | Rp95.000,00                          | Rp130.000,00               |
| 31. | MALUKU                 | OH     | Rp120.000,00                 | Rp120.000,00                  | Rp85.000,00                          | Rp120.000,00               |
| 32. | MALUKU UTARA           | OH     | Rp130.000,00                 | Rp130.000,00                  | Rp95.000,00                          | Rp130.000,00               |
| 33. | PAPUA                  | OH     | Rp200.000,00                 | Rp200.000,00                  | Rp140.000,00                         | Rp200.000,00               |
| 34. | PAPUA BARAT            | OH     | Rp160.000,00                 | Rp160.000,00                  | Rp115.000,00                         | Rp160.000,00               |

4. SATUAN . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 44 -

**4. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS**

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas terinci pada Tabel 1.8, Tabel 1.9, Tabel 1.10, dan Tabel 1.11.

**TABEL 1.8  
KENDARAAN DINAS PEJABAT**

| NO. | PROVINSI           | SATUAN | BESARAN          |
|-----|--------------------|--------|------------------|
| (1) | (2)                | (3)    | (4)              |
| I   | PEJABAT ESELON I   | Unit   | Rp702.970.000,00 |
| II  | PEJABAT ESELON II: |        |                  |
| 1.  | ACEH               | Unit   | Rp515.263.000,00 |
| 2.  | SUMATERA UTARA     | Unit   | Rp513.709.000,00 |
| 3.  | RIAU               | Unit   | Rp450.790.000,00 |
| 4.  | KEPULAUAN RIAU     | Unit   | Rp484.095.000,00 |
| 5.  | JAMBI              | Unit   | Rp471.615.000,00 |
| 6.  | SUMATERA BARAT     | Unit   | Rp482.074.000,00 |
| 7.  | SUMATERA SELATAN   | Unit   | Rp515.263.000,00 |
| 8.  | LAMPUNG            | Unit   | Rp500.494.000,00 |
| 9.  | BENGKULU           | Unit   | Rp482.961.000,00 |
| 10. | BANGKA BELITUNG    | Unit   | Rp482.286.000,00 |
| 11. | BANTEN             | Unit   | Rp462.063.000,00 |
| 12. | JAWA BARAT         | Unit   | Rp491.745.000,00 |
| 13. | D.K.I. JAKARTA     | Unit   | Rp503.860.000,00 |
| 14. | JAWA TENGAH        | Unit   | Rp444.496.000,00 |
| 15. | D.I. YOGYAKARTA    | Unit   | Rp488.645.000,00 |

16. JAWA TIMUR . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 45 -

| NO. | PROVINSI            | SATUAN | BESARAN          |
|-----|---------------------|--------|------------------|
| (1) | (2)                 | (3)    | (4)              |
| 16. | JAWA TIMUR          | Unit   | Rp472.468.000,00 |
| 17. | BALI                | Unit   | Rp481.803.000,00 |
| 18. | NUSA TENGGARA BARAT | Unit   | Rp488.169.000,00 |
| 19. | NUSA TENGGARA TIMUR | Unit   | Rp519.889.000,00 |
| 20. | KALIMANTAN BARAT    | Unit   | Rp475.917.000,00 |
| 21. | KALIMANTAN TENGAH   | Unit   | Rp526.588.000,00 |
| 22. | KALIMANTAN SELATAN  | Unit   | Rp486.306.000,00 |
| 23. | KALIMANTAN TIMUR    | Unit   | Rp523.750.000,00 |
| 24. | KALIMANTAN UTARA    | Unit   | Rp523.750.000,00 |
| 25. | SULAWESI UTARA      | Unit   | Rp478.289.000,00 |
| 26. | GORONTALO           | Unit   | Rp516.850.000,00 |
| 27. | SULAWESI BARAT      | Unit   | Rp428.632.000,00 |
| 28. | SULAWESI SELATAN    | Unit   | Rp513.850.000,00 |
| 29. | SULAWESI TENGAH     | Unit   | Rp526.400.000,00 |
| 30. | SULAWESI TENGGARA   | Unit   | Rp481.316.000,00 |
| 31. | MALUKU              | Unit   | Rp449.526.000,00 |
| 32. | MALUKU UTARA        | Unit   | Rp449.526.000,00 |
| 33. | PAPUA               | Unit   | Rp537.913.000,00 |
| 34. | PAPUA BARAT         | Unit   | Rp535.075.000,00 |

**TABEL 1.9**

**KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN RODA 4 (EMPAT)**

| NO. | PROVINSI       | SATUAN | PICK UP          | MINIBUS          | DOUBLE GARDAN    |
|-----|----------------|--------|------------------|------------------|------------------|
| (1) | (2)            | (3)    | (4)              | (5)              | (6)              |
| 1.  | ACEH           | Unit   | Rp236.677.000,00 | Rp371.353.000,00 | Rp518.306.000,00 |
| 2.  | SUMATERA UTARA | Unit   | Rp261.525.000,00 | Rp308.020.000,00 | Rp473.360.000,00 |
| 3.  | RIAU           | Unit   | Rp259.112.500,00 | Rp367.181.000,00 | Rp472.230.000,00 |
| 4.  | KEPULAUAN RIAU | Unit   | Rp232.830.000,00 | Rp341.568.000,00 | Rp468.830.000,00 |
| 5.  | JAMBI          | Unit   | Rp220.671.000,00 | Rp336.380.000,00 | Rp472.230.000,00 |
| 6.  | SUMATERA BARAT | Unit   | Rp219.606.000,00 | Rp335.431.000,00 | Rp479.479.000,00 |

7. SUMATERA SELATAN . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 46 -

| NO. | PROVINSI            | SATUAN | PICK UP          | MINIBUS          | DOUBLE GARDAN    |
|-----|---------------------|--------|------------------|------------------|------------------|
| (1) | (2)                 | (3)    | (4)              | (5)              | (6)              |
| 7.  | SUMATERA SELATAN    | Unit   | Rp217.972.000,00 | Rp329.730.000,00 | Rp472.230.000,00 |
| 8.  | LAMPUNG             | Unit   | Rp217.056.000,00 | Rp321.100.000,00 | Rp472.230.000,00 |
| 9.  | BENGKULU            | Unit   | Rp259.112.500,00 | Rp320.255.000,00 | Rp472.230.000,00 |
| 10. | BANGKA BELITUNG     | Unit   | Rp232.804.000,00 | Rp330.560.000,00 | Rp472.230.000,00 |
| 11. | BANTEN              | Unit   | Rp205.227.000,00 | Rp327.114.000,00 | Rp463.170.000,00 |
| 12. | JAWA BARAT          | Unit   | Rp253.262.500,00 | Rp328.246.000,00 | Rp463.170.000,00 |
| 13. | D.K.I. JAKARTA      | Unit   | Rp220.334.000,00 | Rp332.544.000,00 | Rp477.458.000,00 |
| 14. | JAWA TENGAH         | Unit   | Rp208.312.000,00 | Rp310.732.000,00 | Rp468.830.000,00 |
| 15. | D.I. YOGYAKARTA     | Unit   | Rp216.910.000,00 | Rp377.950.000,00 | Rp549.567.000,00 |
| 16. | JAWA TIMUR          | Unit   | Rp212.608.000,00 | Rp313.761.000,00 | Rp468.830.000,00 |
| 17. | BALI                | Unit   | Rp209.220.000,00 | Rp320.445.000,00 | Rp473.360.000,00 |
| 18. | NUSA TENGGARA BARAT | Unit   | Rp223.412.000,00 | Rp308.990.000,00 | Rp473.360.000,00 |
| 19. | NUSA TENGGARA TIMUR | Unit   | Rp261.525.000,00 | Rp385.025.000,00 | Rp473.360.000,00 |
| 20. | KALIMANTAN BARAT    | Unit   | Rp220.020.000,00 | Rp342.000.000,00 | Rp492.610.000,00 |
| 21. | KALIMANTAN TENGAH   | Unit   | Rp233.498.000,00 | Rp347.161.000,00 | Rp494.870.000,00 |
| 22. | KALIMANTAN SELATAN  | Unit   | Rp220.020.000,00 | Rp342.000.000,00 | Rp492.610.000,00 |
| 23. | KALIMANTAN TIMUR    | Unit   | Rp220.020.000,00 | Rp342.000.000,00 | Rp492.610.000,00 |
| 24. | KALIMANTAN UTARA    | Unit   | Rp220.020.000,00 | Rp342.000.000,00 | Rp492.610.000,00 |
| 25. | SULAWESI UTARA      | Unit   | Rp228.822.000,00 | Rp342.229.000,00 | Rp492.610.000,00 |
| 26. | GORONTALO           | Unit   | Rp224.020.000,00 | Rp367.877.000,00 | Rp494.870.000,00 |
| 27. | SULAWESI BARAT      | Unit   | Rp234.541.000,00 | Rp323.372.000,00 | Rp468.830.000,00 |
| 28. | SULAWESI SELATAN    | Unit   | Rp252.844.000,00 | Rp377.950.000,00 | Rp468.830.000,00 |
| 29. | SULAWESI TENGAH     | Unit   | Rp280.025.000,00 | Rp352.364.000,00 | Rp494.870.000,00 |
| 30. | SULAWESI TENGGARA   | Unit   | Rp242.157.000,00 | Rp344.260.000,00 | Rp494.870.000,00 |

31. MALUKU . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 47 -

| NO. | PROVINSI     | SATUAN | PICK UP          | MINIBUS          | DOUBLE GARDAN    |
|-----|--------------|--------|------------------|------------------|------------------|
| (1) | (2)          | (3)    | (4)              | (5)              | (6)              |
| 31. | MALUKU       | Unit   | Rp249.099.000,00 | Rp353.320.000,00 | Rp503.930.000,00 |
| 32. | MALUKU UTARA | Unit   | Rp251.303.000,00 | Rp354.547.000,00 | Rp503.930.000,00 |
| 33. | PAPUA        | Unit   | Rp264.377.000,00 | Rp357.850.000,00 | Rp564.390.000,00 |
| 34. | PAPUA BARAT  | Unit   | Rp266.027.000,00 | Rp386.101.000,00 | Rp560.900.000,00 |

**TABEL 1.10  
KENDARAAN OPERASIONAL BUS**

| NO. | URAIAN                     | SATUAN | BESARAN            |
|-----|----------------------------|--------|--------------------|
| (1) | (2)                        | (3)    | (4)                |
| 1.  | Roda 4 dan/atau Bus Kecil  | Unit   | Rp360.942.000,00   |
| 2.  | Roda 6 dan/atau Bus Sedang | Unit   | Rp718.252.000,00   |
| 3.  | Roda 6 dan/atau Bus Besar  | Unit   | Rp1.184.787.000,00 |

**TABEL 1.11  
KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN RODA 2 (DUA)**

| NO. | PROVINSI         | SATUAN | OPERASIONAL     | LAPANGAN        |
|-----|------------------|--------|-----------------|-----------------|
| (1) | (2)              | (3)    | (4)             | (5)             |
| 1.  | ACEH             | Unit   | Rp31.688.000,00 | Rp36.486.000,00 |
| 2.  | SUMATERA UTARA   | Unit   | Rp31.851.000,00 | Rp35.600.000,00 |
| 3.  | RIAU             | Unit   | Rp29.036.000,00 | Rp33.440.000,00 |
| 4.  | KEPULAUAN RIAU   | Unit   | Rp30.767.000,00 | Rp34.001.000,00 |
| 5.  | JAMBI            | Unit   | Rp30.146.000,00 | Rp35.930.000,00 |
| 6.  | SUMATERA BARAT   | Unit   | Rp32.219.000,00 | Rp35.600.000,00 |
| 7.  | SUMATERA SELATAN | Unit   | Rp31.688.000,00 | Rp33.564.000,00 |
| 8.  | LAMPUNG          | Unit   | Rp31.688.000,00 | Rp33.440.000,00 |
| 9.  | BENGKULU         | Unit   | Rp31.688.000,00 | Rp38.146.000,00 |
| 10. | BANGKA BELITUNG  | Unit   | Rp30.676.000,00 | Rp33.440.000,00 |
| 11. | BANTEN           | Unit   | Rp30.017.000,00 | Rp36.360.000,00 |
| 12. | JAWA BARAT       | Unit   | Rp27.417.000,00 | Rp36.592.000,00 |
| 13. | D.K.I. JAKARTA   | Unit   | Rp29.788.000,00 | Rp48.875.000,00 |
| 14. | JAWA TENGAH      | Unit   | Rp30.213.000,00 | Rp33.815.000,00 |
| 15. | D.I. YOGYAKARTA  | Unit   | Rp30.767.000,00 | Rp35.471.000,00 |

16. JAWA TIMUR . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

| NO. | PROVINSI            | SATUAN | OPERASIONAL     | LAPANGAN        |
|-----|---------------------|--------|-----------------|-----------------|
| (1) | (2)                 | (3)    | (4)             | (5)             |
| 16. | JAWA TIMUR          | Unit   | Rp30.767.000,00 | Rp38.702.000,00 |
| 17. | BALI                | Unit   | Rp32.219.000,00 | Rp35.600.000,00 |
| 18. | NUSA TENGGARA BARAT | Unit   | Rp32.219.000,00 | Rp37.125.000,00 |
| 19. | NUSA TENGGARA TIMUR | Unit   | Rp32.219.000,00 | Rp37.742.000,00 |
| 20. | KALIMANTAN BARAT    | Unit   | Rp27.889.000,00 | Rp36.670.000,00 |
| 21. | KALIMANTAN TENGAH   | Unit   | Rp31.029.000,00 | Rp40.583.000,00 |
| 22. | KALIMANTAN SELATAN  | Unit   | Rp31.080.000,00 | Rp38.901.000,00 |
| 23. | KALIMANTAN TIMUR    | Unit   | Rp31.562.000,00 | Rp36.670.000,00 |
| 24. | KALIMANTAN UTARA    | Unit   | Rp31.562.000,00 | Rp36.670.000,00 |
| 25. | SULAWESI UTARA      | Unit   | Rp33.157.000,00 | Rp36.670.000,00 |
| 26. | GORONTALO           | Unit   | Rp31.161.000,00 | Rp37.750.000,00 |
| 27. | SULAWESI BARAT      | Unit   | Rp30.767.000,00 | Rp35.503.000,00 |
| 28. | SULAWESI SELATAN    | Unit   | Rp30.767.000,00 | Rp33.892.000,00 |
| 29. | SULAWESI TENGAH     | Unit   | Rp34.310.000,00 | Rp37.750.000,00 |
| 30. | SULAWESI TENGGARA   | Unit   | Rp34.438.000,00 | Rp38.184.000,00 |
| 31. | MALUKU              | Unit   | Rp32.478.000,00 | Rp38.830.000,00 |
| 32. | MALUKU UTARA        | Unit   | Rp34.184.000,00 | Rp38.830.000,00 |
| 33. | PAPUA               | Unit   | Rp32.224.000,00 | Rp42.070.000,00 |
| 34. | PAPUA BARAT         | Unit   | Rp35.485.000,00 | Rp40.891.000,00 |

Keterangan:

OJ : Orang/Jam  
OH : Orang/Hari  
OB : Orang/Bulan  
OT : Orang/Tahun  
OP : Orang/Paket  
OK : Orang/Kegiatan  
OR : Orang/Responden  
Oter : Orang/Terbitan  
OJP : Orang/Jam Pelajaran

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
Bidang Hukum dan  
Undang-undangan,



Yudia Savanna Djaman



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAMPIRAN II  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 33 TAHUN 2020  
TENTANG  
STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL**

**STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL YANG BERFUNGSI SEBAGAI  
BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN ESTIMASI DALAM  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan Presiden ini mengatur mengenai satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan dengan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban yang terdiri atas:

1. Satuan biaya honorarium narasumber, moderator, dan pembawa acara profesional;
2. Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
3. Satuan biaya konsumsi rapat; dan
4. Satuan biaya pemeliharaan.

**1. HONORARIUM . . .**



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

**1. HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU PEMBAWA ACARA PROFESIONAL**

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya dilaksanakan sesuai satuan biaya honorarium sebagaimana terinci pada Tabel 2.1.

**TABEL 2.1  
HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU  
PEMBAWA ACARA PROFESIONAL**

| NO.  | URAIAN                   | SATUAN | BESARAN        |
|------|--------------------------|--------|----------------|
| 1.1. | Honorarium Narasumber    | OJ     | Rp1.700.000,00 |
| 1.2. | Honorarium Moderator     | OK     | Rp1.000.000,00 |
| 1.3. | Honorarium Pembawa Acara | OK     | Rp750.000,00   |

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar honor narasumber, moderator, atau pembawa acara sebagaimana diatur dalam Tabel 2.1, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

**2. SATUAN . . .**



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

**2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI**

**2.1. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI  
PERGI PULANG (PP)**

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran. Besaran satuan biaya tiket terinci pada Tabel 2.2.

**TABEL 2.2**  
**SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI**  
**PERGI PULANG (PP)**

| NO. | KOTA    |                | SATUAN BIAYA TIKET |                |
|-----|---------|----------------|--------------------|----------------|
|     | ASAL    | TUJUAN         | BISNIS             | EKONOMI        |
| (1) | (2)     | (3)            | (4)                | (5)            |
| 1.  | JAKARTA | AMBON          | Rp13.285.000,00    | Rp7.081.000,00 |
| 2.  | JAKARTA | BALIKPAPAN     | Rp7.412.000,00     | Rp3.797.000,00 |
| 3.  | JAKARTA | BANDA ACEH     | Rp7.519.000,00     | Rp4.492.000,00 |
| 4.  | JAKARTA | BANDAR LAMPUNG | Rp2.407.000,00     | Rp1.583.000,00 |
| 5.  | JAKARTA | BANJARMASIN    | Rp5.252.000,00     | Rp2.995.000,00 |
| 6.  | JAKARTA | BATAM          | Rp4.867.000,00     | Rp2.888.000,00 |
| 7.  | JAKARTA | BENGKULU       | Rp4.364.000,00     | Rp2.621.000,00 |
| 8.  | JAKARTA | BIAK           | Rp14.065.000,00    | Rp7.519.000,00 |
| 9.  | JAKARTA | DENPASAR       | Rp5.305.000,00     | Rp3.262.000,00 |
| 10. | JAKARTA | GORONTALO      | Rp7.231.000,00     | Rp4.824.000,00 |
| 11. | JAKARTA | JAMBI          | Rp4.065.000,00     | Rp2.460.000,00 |
| 12. | JAKARTA | JAYAPURA       | Rp14.568.000,00    | Rp8.193.000,00 |
| 13. | JAKARTA | YOGYAKARTA     | Rp4.107.000,00     | Rp2.268.000,00 |
| 14. | JAKARTA | KENDARI        | Rp7.658.000,00     | Rp4.182.000,00 |
| 15. | JAKARTA | KUPANG         | Rp9.413.000,00     | Rp5.081.000,00 |

16. JAKARTA . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

| NO. | KOTA       |                | SATUAN BIAYA TIKET |                 |
|-----|------------|----------------|--------------------|-----------------|
|     | ASAL       | TUJUAN         | BISNIS             | EKONOMI         |
| 16. | JAKARTA    | MAKASSAR       | Rp7.444.000,00     | Rp3.829.000,00  |
| 17. | JAKARTA    | MALANG         | Rp4.599.000,00     | Rp2.695.000,00  |
| 18. | JAKARTA    | MAMUJU         | Rp7.295.000,00     | Rp4.867.000,00  |
| 19. | JAKARTA    | MANADO         | Rp10.824.000,00    | Rp5.102.000,00  |
| 20. | JAKARTA    | MANOKWARI      | Rp16.226.000,00    | Rp10.824.000,00 |
| 21. | JAKARTA    | MATARAM        | Rp5.316.000,00     | Rp3.230.000,00  |
| 22. | JAKARTA    | MEDAN          | Rp7.252.000,00     | Rp3.808.000,00  |
| 23. | JAKARTA    | PADANG         | Rp5.530.000,00     | Rp2.952.000,00  |
| 24. | JAKARTA    | PALANGKARAYA   | Rp4.984.000,00     | Rp2.984.000,00  |
| 25. | JAKARTA    | PALEMBANG      | Rp3.861.000,00     | Rp2.268.000,00  |
| 26. | JAKARTA    | PALU           | Rp9.348.000,00     | Rp5.113.000,00  |
| 27. | JAKARTA    | PANGKAL PINANG | Rp3.412.000,00     | Rp2.139.000,00  |
| 28. | JAKARTA    | PEKANBARU      | Rp5.583.000,00     | Rp3.016.000,00  |
| 29. | JAKARTA    | PONTIANAK      | Rp4.353.000,00     | Rp2.781.000,00  |
| 30. | JAKARTA    | SEMARANG       | Rp3.861.000,00     | Rp2.182.000,00  |
| 31. | JAKARTA    | SOLO           | Rp3.861.000,00     | Rp2.342.000,00  |
| 32. | JAKARTA    | SURABAYA       | Rp5.466.000,00     | Rp2.674.000,00  |
| 33. | JAKARTA    | TERNATE        | Rp10.001.000,00    | Rp6.664.000,00  |
| 34. | JAKARTA    | TIMIKA         | Rp13.830.000,00    | Rp7.487.000,00  |
| 35. | AMBON      | DENPASAR       | Rp8.054.000,00     | Rp4.471.000,00  |
| 36. | AMBON      | JAYAPURA       | Rp7.434.000,00     | Rp4.161.000,00  |
| 37. | AMBON      | KENDARI        | Rp4.824.000,00     | Rp2.856.000,00  |
| 38. | AMBON      | MAKASSAR       | Rp6.022.000,00     | Rp3.455.000,00  |
| 39. | AMBON      | MANOKWARI      | Rp5.177.000,00     | Rp3.027.000,00  |
| 40. | AMBON      | PALU           | Rp6.140.000,00     | Rp3.508.000,00  |
| 41. | AMBON      | SORONG         | Rp3.637.000,00     | Rp2.257.000,00  |
| 42. | AMBON      | SURABAYA       | Rp8.803.000,00     | Rp4.845.000,00  |
| 43. | AMBON      | TERNATE        | Rp4.022.000,00     | Rp2.449.000,00  |
| 44. | BALIKPAPAN | BANDA ACEH     | Rp12.739.000,00    | Rp6.749.000,00  |
| 45. | BALIKPAPAN | BATAM          | Rp10.354.000,00    | Rp5.305.000,00  |
| 46. | BALIKPAPAN | DENPASAR       | Rp10.739.000,00    | Rp5.648.000,00  |
| 47. | BALIKPAPAN | JAYAPURA       | Rp19.071.000,00    | Rp10.086.000,00 |

48. BALIKPAPAN . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

| NO. | KOTA           |             | SATUAN BIAYA TIKET |                 |
|-----|----------------|-------------|--------------------|-----------------|
|     | ASAL           | TUJUAN      | BISNIS             | EKONOMI         |
| 48. | BALIKPAPAN     | YOGYAKARTA  | Rp9.669.000,00     | Rp4.749.000,00  |
| 49. | BALIKPAPAN     | MAKASSAR    | Rp12.664.000,00    | Rp6.150.000,00  |
| 50. | BALIKPAPAN     | MANADO      | Rp15.702.000,00    | Rp7.295.000,00  |
| 51. | BALIKPAPAN     | MEDAN       | Rp12.493.000,00    | Rp6.140.000,00  |
| 52. | BALIKPAPAN     | PADANG      | Rp10.942.000,00    | Rp5.369.000,00  |
| 53. | BALIKPAPAN     | PALEMBANG   | Rp9.445.000,00     | Rp4.749.000,00  |
| 54. | BALIKPAPAN     | PEKANBARU   | Rp10.996.000,00    | Rp5.423.000,00  |
| 55. | BALIKPAPAN     | SEMARANG    | Rp9.445.000,00     | Rp4.674.000,00  |
| 56. | BALIKPAPAN     | SOLO        | Rp9.445.000,00     | Rp4.813.000,00  |
| 57. | BALIKPAPAN     | SURABAYA    | Rp10.889.000,00    | Rp5.113.000,00  |
| 58. | BALIKPAPAN     | TIMIKA      | Rp18.408.000,00    | Rp9.445.000,00  |
| 59. | BANDA ACEH     | DENPASAR    | Rp10.835.000,00    | Rp6.279.000,00  |
| 60. | BANDA ACEH     | JAYAPURA    | Rp19.167.000,00    | Rp10.717.000,00 |
| 61. | BANDA ACEH     | YOGYAKARTA  | Rp9.765.000,00     | Rp5.380.000,00  |
| 62. | BANDA ACEH     | MAKASSAR    | Rp12.760.000,00    | Rp6.781.000,00  |
| 63. | BANDA ACEH     | MANADO      | Rp15.798.000,00    | Rp7.926.000,00  |
| 64. | BANDA ACEH     | PONTIANAK   | Rp9.990.000,00     | Rp5.840.000,00  |
| 65. | BANDA ACEH     | SEMARANG    | Rp9.530.000,00     | Rp5.305.000,00  |
| 66. | BANDA ACEH     | SOLO        | Rp9.530.000,00     | Rp5.444.000,00  |
| 67. | BANDA ACEH     | SURABAYA    | Rp10.985.000,00    | Rp5.744.000,00  |
| 68. | BANDA ACEH     | TIMIKA      | Rp18.504.000,00    | Rp10.076.000,00 |
| 69. | BANDAR LAMPUNG | BALIKPAPAN  | Rp8.129.000,00     | Rp4.129.000,00  |
| 70. | BANDAR LAMPUNG | BANDA ACEH  | Rp8.225.000,00     | Rp4.760.000,00  |
| 71. | BANDAR LAMPUNG | BANJARMASIN | Rp6.193.000,00     | Rp3.412.000,00  |
| 72. | BANDAR LAMPUNG | BATAM       | Rp5.840.000,00     | Rp3.316.000,00  |
| 73. | BANDAR LAMPUNG | BIAK        | Rp14.119.000,00    | Rp7.487.000,00  |
| 74. | BANDAR LAMPUNG | DENPASAR    | Rp6.236.000,00     | Rp3.647.000,00  |
| 75. | BANDAR LAMPUNG | JAYAPURA    | Rp14.568.000,00    | Rp8.097.000,00  |
| 76. | BANDAR LAMPUNG | YOGYAKARTA  | Rp5.155.000,00     | Rp2.760.000,00  |
| 77. | BANDAR LAMPUNG | KENDARI     | Rp8.354.000,00     | Rp4.482.000,00  |
| 78. | BANDAR LAMPUNG | MAKASSAR    | Rp8.161.000,00     | Rp4.161.000,00  |
| 79. | BANDAR LAMPUNG | MALANG      | Rp5.594.000,00     | Rp3.134.000,00  |

80. BANDAR LAMPUNG



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

| NO.  | KOTA           |                | SATUAN BIAYA TIKET |                |
|------|----------------|----------------|--------------------|----------------|
|      | ASAL           | TUJUAN         | BISNIS             | EKONOMI        |
| 80.  | BANDAR LAMPUNG | MANADO         | Rp11.199.000,00    | Rp5.305.000,00 |
| 81.  | BANDAR LAMPUNG | MATARAM        | Rp6.246.000,00     | Rp3.626.000,00 |
| 82.  | BANDAR LAMPUNG | MEDAN          | Rp7.979.000,00     | Rp4.150.000,00 |
| 83.  | BANDAR LAMPUNG | PADANG         | Rp6.439.000,00     | Rp3.380.000,00 |
| 84.  | BANDAR LAMPUNG | PALANGKARAYA   | Rp5.947.000,00     | Rp3.401.000,00 |
| 85.  | BANDAR LAMPUNG | PALEMBANG      | Rp4.931.000,00     | Rp2.760.000,00 |
| 86.  | BANDAR LAMPUNG | PEKANBARU      | Rp6.482.000,00     | Rp3.433.000,00 |
| 87.  | BANDAR LAMPUNG | PONTIANAK      | Rp5.380.000,00     | Rp3.220.000,00 |
| 88.  | BANDAR LAMPUNG | SEMARANG       | Rp4.931.000,00     | Rp2.685.000,00 |
| 89.  | BANDAR LAMPUNG | SOLO           | Rp4.931.000,00     | Rp2.824.000,00 |
| 90.  | BANDAR LAMPUNG | SURABAYA       | Rp6.386.000,00     | Rp3.123.000,00 |
| 91.  | BANDAR LAMPUNG | TIMIKA         | Rp13.905.000,00    | Rp7.455.000,00 |
| 92.  | BANDUNG        | BATAM          | Rp6.289.000,00     | Rp3.583.000,00 |
| 93.  | BANDUNG        | DENPASAR       | Rp5.626.000,00     | Rp3.252.000,00 |
| 94.  | BANDUNG        | JAKARTA        | Rp2.064.000,00     | Rp1.476.000,00 |
| 95.  | BANDUNG        | JAMBI          | Rp5.006.000,00     | Rp2.941.000,00 |
| 96.  | BANDUNG        | YOGYAKARTA     | Rp3.369.000,00     | Rp2.129.000,00 |
| 97.  | BANDUNG        | PADANG         | Rp6.129.000,00     | Rp3.508.000,00 |
| 98.  | BANDUNG        | PALEMBANG      | Rp4.385.000,00     | Rp2.631.000,00 |
| 99.  | BANDUNG        | PANGKAL PINANG | Rp4.599.000,00     | Rp2.738.000,00 |
| 100. | BANDUNG        | PEKANBARU      | Rp6.525.000,00     | Rp3.701.000,00 |
| 101. | BANDUNG        | SEMARANG       | Rp3.027.000,00     | Rp1.957.000,00 |
| 102. | BANDUNG        | SOLO           | Rp3.647.000,00     | Rp2.268.000,00 |
| 103. | BANDUNG        | SURABAYA       | Rp4.824.000,00     | Rp2.856.000,00 |
| 104. | BANDUNG        | TANJUNG PANDAN | Rp4.439.000,00     | Rp2.663.000,00 |
| 105. | BANJARMASIN    | BANDA ACEH     | Rp10.792.000,00    | Rp6.022.000,00 |
| 106. | BANJARMASIN    | BATAM          | Rp8.407.000,00     | Rp4.578.000,00 |
| 107. | BANJARMASIN    | BIAK           | Rp16.686.000,00    | Rp8.749.000,00 |
| 108. | BANJARMASIN    | DENPASAR       | Rp8.792.000,00     | Rp4.920.000,00 |
| 109. | BANJARMASIN    | JAYAPURA       | Rp17.135.000,00    | Rp9.359.000,00 |
| 110. | BANJARMASIN    | YOGYAKARTA     | Rp7.723.000,00     | Rp4.022.000,00 |
| 111. | BANJARMASIN    | MEDAN          | Rp10.546.000,00    | Rp5.412.000,00 |

112. BANJARMASIN . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

| NO.  | KOTA        |            | SATUAN BIAYA TIKET |                 |
|------|-------------|------------|--------------------|-----------------|
|      | ASAL        | TUJUAN     | BISNIS             | EKONOMI         |
| 112. | BANJARMASIN | PADANG     | Rp9.006.000,00     | Rp4.642.000,00  |
| 113. | BANJARMASIN | PALEMBANG  | Rp7.498.000,00     | Rp4.022.000,00  |
| 114. | BANJARMASIN | PEKANBARU  | Rp9.049.000,00     | Rp4.696.000,00  |
| 115. | BANJARMASIN | SEMARANG   | Rp7.498.000,00     | Rp3.958.000,00  |
| 116. | BANJARMASIN | SOLO       | Rp7.498.000,00     | Rp4.097.000,00  |
| 117. | BANJARMASIN | SURABAYA   | Rp8.942.000,00     | Rp4.385.000,00  |
| 118. | BANJARMASIN | TIMIKA     | Rp16.472.000,00    | Rp8.717.000,00  |
| 119. | BATAM       | BANDA ACEH | Rp10.439.000,00    | Rp5.936.000,00  |
| 120. | BATAM       | DENPASAR   | Rp8.450.000,00     | Rp4.824.000,00  |
| 121. | BATAM       | JAYAPURA   | Rp16.782.000,00    | Rp9.263.000,00  |
| 122. | BATAM       | YOGYAKARTA | Rp7.370.000,00     | Rp3.936.000,00  |
| 123. | BATAM       | MAKASSAR   | Rp10.375.000,00    | Rp5.337.000,00  |
| 124. | BATAM       | MANADO     | Rp13.413.000,00    | Rp6.482.000,00  |
| 125. | BATAM       | MEDAN      | Rp10.193.000,00    | Rp5.316.000,00  |
| 126. | BATAM       | PADANG     | Rp8.653.000,00     | Rp4.546.000,00  |
| 127. | BATAM       | PALEMBANG  | Rp7.145.000,00     | Rp3.936.000,00  |
| 128. | BATAM       | PEKANBARU  | Rp8.707.000,00     | Rp4.599.000,00  |
| 129. | BATAM       | PONTIANAK  | Rp7.594.000,00     | Rp4.396.000,00  |
| 130. | BATAM       | SEMARANG   | Rp7.145.000,00     | Rp3.861.000,00  |
| 131. | BATAM       | SOLO       | Rp7.145.000,00     | Rp4.000.000,00  |
| 132. | BATAM       | SURABAYA   | Rp8.600.000,00     | Rp4.300.000,00  |
| 133. | BATAM       | TIMIKA     | Rp16.119.000,00    | Rp8.621.000,00  |
| 134. | BENGKULU    | PALEMBANG  | Rp2.899.000,00     | Rp1.893.000,00  |
| 135. | BIAK        | BALIKPAPAN | Rp18.622.000,00    | Rp9.477.000,00  |
| 136. | BIAK        | BANDA ACEH | Rp18.718.000,00    | Rp10.108.000,00 |
| 137. | BIAK        | BATAM      | Rp16.333.000,00    | Rp8.664.000,00  |
| 138. | BIAK        | DENPASAR   | Rp16.729.000,00    | Rp8.995.000,00  |
| 139. | BIAK        | JAYAPURA   | Rp3.615.000,00     | Rp2.321.000,00  |
| 140. | BIAK        | YOGYAKARTA | Rp15.648.000,00    | Rp8.108.000,00  |
| 141. | BIAK        | MANADO     | Rp11.734.000,00    | Rp6.353.000,00  |
| 142. | BIAK        | MEDAN      | Rp18.472.000,00    | Rp9.498.000,00  |
| 143. | BIAK        | PADANG     | Rp16.932.000,00    | Rp8.728.000,00  |

144. BIAK . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

| NO.  | KOTA     |              | SATUAN BIAYA TIKET |                 |
|------|----------|--------------|--------------------|-----------------|
|      | ASAL     | TUJUAN       | BISNIS             | EKONOMI         |
| 144. | BLAK     | PALEMBANG    | Rp15.424.000,00    | Rp8.108.000,00  |
| 145. | BLAK     | PEKANBARU    | Rp16.985.000,00    | Rp8.781.000,00  |
| 146. | BLAK     | PONTIANAK    | Rp15.873.000,00    | Rp8.568.000,00  |
| 147. | BLAK     | SURABAYA     | Rp12.782.000,00    | Rp7.081.000,00  |
| 148. | BLAK     | TIMIKA       | Rp5.808.000,00     | Rp3.444.000,00  |
| 149. | DENPASAR | JAYAPURA     | Rp11.680.000,00    | Rp6.845.000,00  |
| 150. | DENPASAR | KUPANG       | Rp5.091.000,00     | Rp2.952.000,00  |
| 151. | DENPASAR | MAKASSAR     | Rp4.182.000,00     | Rp2.631.000,00  |
| 152. | DENPASAR | MANADO       | Rp7.851.000,00     | Rp4.278.000,00  |
| 153. | DENPASAR | MATARAM      | Rp1.840.000,00     | Rp1.390.000,00  |
| 154. | DENPASAR | MEDAN        | Rp10.589.000,00    | Rp5.658.000,00  |
| 155. | DENPASAR | PADANG       | Rp9.049.000,00     | Rp4.888.000,00  |
| 156. | DENPASAR | PALANGKARAYA | Rp8.557.000,00     | Rp4.909.000,00  |
| 157. | DENPASAR | PALEMBANG    | Rp7.541.000,00     | Rp4.278.000,00  |
| 158. | DENPASAR | PEKANBARU    | Rp9.092.000,00     | Rp4.942.000,00  |
| 159. | DENPASAR | PONTIANAK    | Rp7.990.000,00     | Rp4.738.000,00  |
| 160. | DENPASAR | TIMIKA       | Rp10.140.000,00    | Rp6.129.000,00  |
| 161. | JAMBI    | BALIKPAPAN   | Rp7.733.000,00     | Rp4.407.000,00  |
| 162. | JAMBI    | BANJARMASIN  | Rp7.690.000,00     | Rp4.193.000,00  |
| 163. | JAMBI    | DENPASAR     | Rp7.733.000,00     | Rp4.439.000,00  |
| 164. | JAMBI    | YOGYAKARTA   | Rp6.653.000,00     | Rp3.551.000,00  |
| 165. | JAMBI    | KUPANG       | Rp11.434.000,00    | Rp6.075.000,00  |
| 166. | JAMBI    | MAKASSAR     | Rp9.659.000,00     | Rp4.952.000,00  |
| 167. | JAMBI    | MALANG       | Rp7.091.000,00     | Rp3.925.000,00  |
| 168. | JAMBI    | MANADO       | Rp12.707.000,00    | Rp6.097.000,00  |
| 169. | JAMBI    | PALANGKARAYA | Rp7.444.000,00     | Rp4.193.000,00  |
| 170. | JAMBI    | PONTIANAK    | Rp6.878.000,00     | Rp4.011.000,00  |
| 171. | JAMBI    | SEMARANG     | Rp6.428.000,00     | Rp3.476.000,00  |
| 172. | JAMBI    | SOLO         | Rp6.428.000,00     | Rp3.615.000,00  |
| 173. | JAMBI    | SURABAYA     | Rp7.883.000,00     | Rp3.915.000,00  |
| 174. | JAYAPURA | YOGYAKARTA   | Rp13.274.000,00    | Rp7.690.000,00  |
| 175. | JAYAPURA | MANADO       | Rp22.109.000,00    | Rp11.263.000,00 |

176. JAYAPURA . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

| NO.  | KOTA       |            | SATUAN BIAYA TIKET |                 |
|------|------------|------------|--------------------|-----------------|
|      | ASAL       | TUJUAN     | BISNIS             | EKONOMI         |
| 176. | JAYAPURA   | MEDAN      | Rp18.932.000,00    | Rp10.097.000,00 |
| 177. | JAYAPURA   | PADANG     | Rp17.381.000,00    | Rp9.327.000,00  |
| 178. | JAYAPURA   | PALEMBANG  | Rp15.873.000,00    | Rp8.717.000,00  |
| 179. | JAYAPURA   | PEKANBARU  | Rp17.435.000,00    | Rp9.380.000,00  |
| 180. | JAYAPURA   | PONTIANAK  | Rp16.322.000,00    | Rp9.177.000,00  |
| 181. | JAYAPURA   | TIMIKA     | Rp3.615.000,00     | Rp2.289.000,00  |
| 182. | YOGYAKARTA | DENPASAR   | Rp3.861.000,00     | Rp2.481.000,00  |
| 183. | YOGYAKARTA | MAKASSAR   | Rp6.525.000,00     | Rp3.893.000,00  |
| 184. | YOGYAKARTA | MANADO     | Rp10.536.000,00    | Rp5.722.000,00  |
| 185. | YOGYAKARTA | MEDAN      | Rp9.519.000,00     | Rp4.770.000,00  |
| 186. | YOGYAKARTA | PADANG     | Rp7.969.000,00     | Rp4.000.000,00  |
| 187. | YOGYAKARTA | PALEMBANG  | Rp6.460.000,00     | Rp3.380.000,00  |
| 188. | YOGYAKARTA | PEKANBARU  | Rp8.022.000,00     | Rp4.054.000,00  |
| 189. | YOGYAKARTA | PONTIANAK  | Rp6.910.000,00     | Rp3.840.000,00  |
| 190. | YOGYAKARTA | TIMIKA     | Rp11.894.000,00    | Rp7.038.000,00  |
| 191. | KENDARI    | BANDA ACEH | Rp12.953.000,00    | Rp7.102.000,00  |
| 192. | KENDARI    | BATAM      | Rp10.568.000,00    | Rp5.658.000,00  |
| 193. | KENDARI    | DENPASAR   | Rp5.455.000,00     | Rp3.273.000,00  |
| 194. | KENDARI    | YOGYAKARTA | Rp8.129.000,00     | Rp4.706.000,00  |
| 195. | KENDARI    | PADANG     | Rp11.167.000,00    | Rp5.722.000,00  |
| 196. | KENDARI    | PALEMBANG  | Rp9.659.000,00     | Rp5.102.000,00  |
| 197. | KENDARI    | PEKANBARU  | Rp11.220.000,00    | Rp5.776.000,00  |
| 198. | KENDARI    | SEMARANG   | Rp9.659.000,00     | Rp5.027.000,00  |
| 199. | KENDARI    | SOLO       | Rp9.659.000,00     | Rp5.166.000,00  |
| 200. | KENDARI    | SURABAYA   | Rp11.103.000,00    | Rp5.466.000,00  |
| 201. | KENDARI    | TIMIKA     | Rp18.633.000,00    | Rp9.798.000,00  |
| 202. | KUPANG     | JAYAPURA   | Rp14.386.000,00    | Rp8.108.000,00  |
| 203. | KUPANG     | YOGYAKARTA | Rp7.348.000,00     | Rp4.182.000,00  |
| 204. | KUPANG     | MAKASSAR   | Rp7.637.000,00     | Rp4.311.000,00  |
| 205. | KUPANG     | MANADO     | Rp11.648.000,00    | Rp6.140.000,00  |
| 206. | KUPANG     | SURABAYA   | Rp6.749.000,00     | Rp3.722.000,00  |
| 207. | MAKASSAR   | BIAK       | Rp8.493.000,00     | Rp4.931.000,00  |

208. MAKASSAR . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

| NO.  | KOTA     |              | SATUAN BIAYA TIKET |                |
|------|----------|--------------|--------------------|----------------|
|      | ASAL     | TUJUAN       | BISNIS             | EKONOMI        |
| 208. | MAKASSAR | JAYAPURA     | Rp10.193.000,00    | Rp5.787.000,00 |
| 209. | MAKASSAR | KENDARI      | Rp2.663.000,00     | Rp1.786.000,00 |
| 210. | MAKASSAR | MANADO       | Rp5.327.000,00     | Rp2.909.000,00 |
| 211. | MAKASSAR | TIMIKA       | Rp11.723.000,00    | Rp6.567.000,00 |
| 212. | MALANG   | BALIKPAPAN   | Rp10.108.000,00    | Rp5.134.000,00 |
| 213. | MALANG   | BANDA ACEH   | Rp10.204.000,00    | Rp5.765.000,00 |
| 214. | MALANG   | BANJARMASIN  | Rp8.161.000,00     | Rp4.407.000,00 |
| 215. | MALANG   | BATAM        | Rp7.819.000,00     | Rp4.311.000,00 |
| 216. | MALANG   | BLAK         | Rp16.087.000,00    | Rp8.482.000,00 |
| 217. | MALANG   | JAYAPURA     | Rp16.536.000,00    | Rp9.092.000,00 |
| 218. | MALANG   | KENDARI      | Rp10.322.000,00    | Rp5.487.000,00 |
| 219. | MALANG   | MAKASSAR     | Rp10.129.000,00    | Rp5.166.000,00 |
| 220. | MALANG   | MANADO       | Rp13.167.000,00    | Rp6.311.000,00 |
| 221. | MALANG   | MEDAN        | Rp9.958.000,00     | Rp5.145.000,00 |
| 222. | MALANG   | PADANG       | Rp8.418.000,00     | Rp4.385.000,00 |
| 223. | MALANG   | PALANGKARAYA | Rp7.915.000,00     | Rp4.407.000,00 |
| 224. | MALANG   | PALEMBANG    | Rp6.899.000,00     | Rp3.765.000,00 |
| 225. | MALANG   | PEKANBARU    | Rp8.461.000,00     | Rp4.439.000,00 |
| 226. | MALANG   | TIMIKA       | Rp15.873.000,00    | Rp8.461.000,00 |
| 227. | MANADO   | MEDAN        | Rp15.552.000,00    | Rp7.316.000,00 |
| 228. | MANADO   | PADANG       | Rp14.012.000,00    | Rp6.546.000,00 |
| 229. | MANADO   | PALEMBANG    | Rp12.504.000,00    | Rp5.926.000,00 |
| 230. | MANADO   | PEKANBARU    | Rp14.055.000,00    | Rp6.599.000,00 |
| 231. | MANADO   | PONTIANAK    | Rp12.953.000,00    | Rp6.396.000,00 |
| 232. | MANADO   | SEMARANG     | Rp12.504.000,00    | Rp5.851.000,00 |
| 233. | MANADO   | SOLO         | Rp12.504.000,00    | Rp5.990.000,00 |
| 234. | MANADO   | SURABAYA     | Rp9.937.000,00     | Rp5.262.000,00 |
| 235. | MANADO   | TIMIKA       | Rp16.183.000,00    | Rp8.995.000,00 |
| 236. | MATARAM  | BALIKPAPAN   | Rp10.750.000,00    | Rp5.615.000,00 |
| 237. | MATARAM  | BANDA ACEH   | Rp10.846.000,00    | Rp6.246.000,00 |
| 238. | MATARAM  | BANJARMASIN  | Rp8.803.000,00     | Rp4.888.000,00 |
| 239. | MATARAM  | BATAM        | Rp8.461.000,00     | Rp4.803.000,00 |

240. MATARAM . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

| NO.  | KOTA         |            | SATUAN BIAYA TIKET |                |
|------|--------------|------------|--------------------|----------------|
|      | ASAL         | TUJUAN     | BISNIS             | EKONOMI        |
| 240. | MATARAM      | BIAK       | Rp11.552.000,00    | Rp6.546.000,00 |
| 241. | MATARAM      | JAYAPURA   | Rp13.092.000,00    | Rp7.327.000,00 |
| 242. | MATARAM      | YOGYAKARTA | Rp4.417.000,00     | Rp2.781.000,00 |
| 243. | MATARAM      | MAKASSAR   | Rp4.717.000,00     | Rp2.909.000,00 |
| 244. | MATARAM      | MANADO     | Rp8.717.000,00     | Rp4.738.000,00 |
| 245. | MATARAM      | MEDAN      | Rp10.600.000,00    | Rp5.637.000,00 |
| 246. | MATARAM      | PADANG     | Rp9.060.000,00     | Rp4.867.000,00 |
| 247. | MATARAM      | PALEMBANG  | Rp7.551.000,00     | Rp4.246.000,00 |
| 248. | MATARAM      | PEKANBARU  | Rp9.102.000,00     | Rp4.909.000,00 |
| 249. | MATARAM      | PONTIANAK  | Rp8.001.000,00     | Rp4.706.000,00 |
| 250. | MATARAM      | SURABAYA   | Rp3.829.000,00     | Rp2.321.000,00 |
| 251. | MEDAN        | BANDA ACEH | Rp3.466.000,00     | Rp2.193.000,00 |
| 252. | MEDAN        | MAKASSAR   | Rp12.514.000,00    | Rp6.172.000,00 |
| 253. | MEDAN        | PONTIANAK  | Rp9.733.000,00     | Rp5.230.000,00 |
| 254. | MEDAN        | SEMARANG   | Rp9.284.000,00     | Rp4.696.000,00 |
| 255. | MEDAN        | SOLO       | Rp9.284.000,00     | Rp4.835.000,00 |
| 256. | MEDAN        | SURABAYA   | Rp10.739.000,00    | Rp5.134.000,00 |
| 257. | MEDAN        | TIMIKA     | Rp18.258.000,00    | Rp9.455.000,00 |
| 258. | PADANG       | MAKASSAR   | Rp10.974.000,00    | Rp5.402.000,00 |
| 259. | PADANG       | PONTIANAK  | Rp8.193.000,00     | Rp4.460.000,00 |
| 260. | PADANG       | SEMARANG   | Rp7.744.000,00     | Rp3.925.000,00 |
| 261. | PADANG       | SOLO       | Rp7.744.000,00     | Rp4.065.000,00 |
| 262. | PADANG       | SURABAYA   | Rp9.199.000,00     | Rp4.364.000,00 |
| 263. | PADANG       | TIMIKA     | Rp16.718.000,00    | Rp8.685.000,00 |
| 264. | PALANGKARAYA | BANDA ACEH | Rp10.546.000,00    | Rp6.022.000,00 |
| 265. | PALANGKARAYA | BATAM      | Rp8.161.000,00     | Rp4.578.000,00 |
| 266. | PALANGKARAYA | YOGYAKARTA | Rp7.477.000,00     | Rp4.022.000,00 |
| 267. | PALANGKARAYA | MATARAM    | Rp8.557.000,00     | Rp4.888.000,00 |
| 268. | PALANGKARAYA | MEDAN      | Rp10.300.000,00    | Rp5.412.000,00 |
| 269. | PALANGKARAYA | PADANG     | Rp8.760.000,00     | Rp4.642.000,00 |
| 270. | PALANGKARAYA | PALEMBANG  | Rp7.252.000,00     | Rp4.022.000,00 |
| 271. | PALANGKARAYA | PEKANBARU  | Rp8.803.000,00     | Rp4.696.000,00 |

272. PALANGKARAYA . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

| NO.  | KOTA           |             | SATUAN BIAYA TIKET |                |
|------|----------------|-------------|--------------------|----------------|
|      | ASAL           | TUJUAN      | BISNIS             | EKONOMI        |
| 272. | PALANGKARAYA   | SEMARANG    | Rp7.252.000,00     | Rp3.947.000,00 |
| 273. | PALANGKARAYA   | SOLO        | Rp7.252.000,00     | Rp4.086.000,00 |
| 274. | PALANGKARAYA   | SURABAYA    | Rp8.696.000,00     | Rp4.385.000,00 |
| 275. | PALEMBANG      | BALIKPAPAN  | Rp9.894.000,00     | Rp5.220.000,00 |
| 276. | PALEMBANG      | MAKASSAR    | Rp9.466.000,00     | Rp4.781.000,00 |
| 277. | PALEMBANG      | PONTIANAK   | Rp6.685.000,00     | Rp3.840.000,00 |
| 278. | PALEMBANG      | SEMARANG    | Rp6.236.000,00     | Rp3.305.000,00 |
| 279. | PALEMBANG      | SOLO        | Rp6.236.000,00     | Rp3.444.000,00 |
| 280. | PALEMBANG      | SURABAYA    | Rp7.690.000,00     | Rp3.744.000,00 |
| 281. | PALEMBANG      | TIMIKA      | Rp15.210.000,00    | Rp8.076.000,00 |
| 282. | PALU           | MAKASSAR    | Rp4.268.000,00     | Rp2.578.000,00 |
| 283. | PALU           | POSO        | Rp1.957.000,00     | Rp1.423.000,00 |
| 284. | PALU           | SORONG      | Rp6.878.000,00     | Rp3.883.000,00 |
| 285. | PALU           | SURABAYA    | Rp6.878.000,00     | Rp3.883.000,00 |
| 286. | PALU           | TOLI-TOLI   | Rp2.941.000,00     | Rp1.915.000,00 |
| 287. | PANGKAL PINANG | BALIKPAPAN  | Rp9.038.000,00     | Rp4.631.000,00 |
| 288. | PANGKAL PINANG | BANJARMASIN | Rp7.091.000,00     | Rp3.915.000,00 |
| 289. | PANGKAL PINANG | BATAM       | Rp6.739.000,00     | Rp3.818.000,00 |
| 290. | PANGKAL PINANG | YOGYAKARTA  | Rp6.065.000,00     | Rp3.262.000,00 |
| 291. | PANGKAL PINANG | MAKASSAR    | Rp9.060.000,00     | Rp4.663.000,00 |
| 292. | PANGKAL PINANG | MANADO      | Rp12.097.000,00    | Rp5.808.000,00 |
| 293. | PANGKAL PINANG | MEDAN       | Rp8.888.000,00     | Rp4.653.000,00 |
| 294. | PANGKAL PINANG | PADANG      | Rp7.337.000,00     | Rp3.883.000,00 |
| 295. | PANGKAL PINANG | PALEMBANG   | Rp5.829.000,00     | Rp3.262.000,00 |
| 296. | PANGKAL PINANG | PEKANBARU   | Rp7.391.000,00     | Rp3.936.000,00 |
| 297. | PANGKAL PINANG | PONTIANAK   | Rp6.279.000,00     | Rp3.733.000,00 |
| 298. | PANGKAL PINANG | SEMARANG    | Rp5.829.000,00     | Rp3.187.000,00 |
| 299. | PANGKAL PINANG | SOLO        | Rp5.829.000,00     | Rp3.326.000,00 |
| 300. | PANGKAL PINANG | SURABAYA    | Rp7.284.000,00     | Rp3.626.000,00 |
| 301. | PEKANBARU      | PONTIANAK   | Rp8.247.000,00     | Rp4.514.000,00 |
| 302. | PEKANBARU      | SEMARANG    | Rp7.797.000,00     | Rp3.979.000,00 |
| 303. | PEKANBARU      | SOLO        | Rp7.797.000,00     | Rp4.118.000,00 |

304. PEKANBARU . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

| NO.  | KOTA      |          | SATUAN BIAYA TIKET |                |
|------|-----------|----------|--------------------|----------------|
|      | ASAL      | TUJUAN   | BISNIS             | EKONOMI        |
| 304. | PEKANBARU | SURABAYA | Rp9.241.000,00     | Rp4.407.000,00 |
| 305. | PEKANBARU | TIMIKA   | Rp16.771.000,00    | Rp8.739.000,00 |
| 306. | PONTIANAK | MAKASSAR | Rp9.915.000,00     | Rp5.241.000,00 |
| 307. | PONTIANAK | SEMARANG | Rp6.685.000,00     | Rp3.765.000,00 |
| 308. | PONTIANAK | SOLO     | Rp6.685.000,00     | Rp3.904.000,00 |
| 309. | PONTIANAK | SURABAYA | Rp8.140.000,00     | Rp4.204.000,00 |
| 310. | PONTIANAK | TIMIKA   | Rp15.659.000,00    | Rp8.535.000,00 |
| 311. | SEMARANG  | MAKASSAR | Rp9.466.000,00     | Rp4.706.000,00 |
| 312. | SOLO      | MAKASSAR | Rp9.466.000,00     | Rp4.845.000,00 |
| 313. | SURABAYA  | DENPASAR | Rp3.198.000,00     | Rp1.979.000,00 |
| 314. | SURABAYA  | JAYAPURA | Rp12.675.000,00    | Rp7.231.000,00 |
| 315. | SURABAYA  | MAKASSAR | Rp5.936.000,00     | Rp3.433.000,00 |
| 316. | SURABAYA  | TIMIKA   | Rp11.295.000,00    | Rp6.589.000,00 |

Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 2.2, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).

**2.2. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI**

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi:

**a. keberangkatan**

- 1) dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
- 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;

**b. kepulangan . . .**



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

**b. kepulangan**

- 1) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
- 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 2.3.

Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri dalam Tabel 2.3, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

**TABEL 2.3**  
**SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI**

| NO. | PROVINSI       | SATUAN     | BESARAN      |
|-----|----------------|------------|--------------|
| (1) | (2)            | (3)        | (4)          |
| 1.  | ACEH           | Orang/Kali | Rp123.000,00 |
| 2.  | SUMATERA UTARA | Orang/Kali | Rp232.000,00 |
| 3.  | RIAU           | Orang/Kali | Rp94.000,00  |
| 4.  | KEPULAUAN RIAU | Orang/Kali | Rp137.000,00 |
| 5.  | JAMBI          | Orang/Kali | Rp147.000,00 |
| 6.  | SUMATERA BARAT | Orang/Kali | Rp190.000,00 |

7. SUMATERA SELATAN . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

| NO. | PROVINSI            | SATUAN     | BESARAN      |
|-----|---------------------|------------|--------------|
| (1) | (2)                 | (3)        | (4)          |
| 7.  | SUMATERA SELATAN    | Orang/Kali | Rp128.000,00 |
| 8.  | LAMPUNG             | Orang/Kali | Rp167.000,00 |
| 9.  | BENGKULU            | Orang/Kali | Rp109.000,00 |
| 10. | BANGKA BELITUNG     | Orang/Kali | Rp90.000,00  |
| 11. | BANTEN              | Orang/Kali | Rp446.000,00 |
| 12. | JAWA BARAT          | Orang/Kali | Rp166.000,00 |
| 13. | D.K.I. JAKARTA      | Orang/Kali | Rp256.000,00 |
| 14. | JAWA TENGAH         | Orang/Kali | Rp75.000,00  |
| 15. | D.I. YOGYAKARTA     | Orang/Kali | Rp118.000,00 |
| 16. | JAWA TIMUR          | Orang/Kali | Rp194.000,00 |
| 17. | BALI                | Orang/Kali | Rp159.000,00 |
| 18. | NUSA TENGGARA BARAT | Orang/Kali | Rp231.000,00 |
| 19. | NUSA TENGGARA TIMUR | Orang/Kali | Rp108.000,00 |
| 20. | KALIMANTAN BARAT    | Orang/Kali | Rp135.000,00 |
| 21. | KALIMANTAN TENGAH   | Orang/Kali | Rp111.000,00 |
| 22. | KALIMANTAN SELATAN  | Orang/Kali | Rp150.000,00 |
| 23. | KALIMANTAN TIMUR    | Orang/Kali | Rp450.000,00 |
| 24. | KALIMANTAN UTARA    | Orang/Kali | Rp102.000,00 |
| 25. | SULAWESI UTARA      | Orang/Kali | Rp138.000,00 |
| 26. | GORONTALO           | Orang/Kali | Rp240.000,00 |
| 27. | SULAWESI BARAT      | Orang/Kali | Rp313.000,00 |
| 28. | SULAWESI SELATAN    | Orang/Kali | Rp145.000,00 |
| 29. | SULAWESI TENGAH     | Orang/Kali | Rp165.000,00 |
| 30. | SULAWESI TENGGARA   | Orang/Kali | Rp171.000,00 |
| 31. | MALUKU              | Orang/Kali | Rp240.000,00 |
| 32. | MALUKU UTARA        | Orang/Kali | Rp215.000,00 |
| 33. | PAPUA               | Orang/Kali | Rp431.000,00 |
| 34. | PAPUA BARAT         | Orang/Kali | Rp182.000,00 |

Contoh 1 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

**Contoh 1:**

Saudara A sebagai pejabat di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Surabaya ke Kabupaten Pegunungan Bintang, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

**a. keberangkatan**

- 1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya;
- 2) satuan biaya taksi dari Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang) ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Pegunungan Bintang; dan
- 3) satuan biaya transportasi darat dari hotel menuju tempat tujuan penugasan (tidak tersedia taksi) menggunakan moda transportasi darat dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*.

**b. kepulangan**

- 1) satuan biaya transportasi dari tempat tujuan menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*;
- 2) satuan biaya taksi dari hotel atau penginapan (Pegunungan Bintang) ke Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang); dan
- 3) satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).

**Contoh 2 . . .**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Contoh 2:

Seorang B sebagai pegawai di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Surabaya ke Kecamatan Takabone Rate di Kabupaten Kepulauan Selayar, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

a. keberangkatan

- 1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya; dan
- 2) satuan biaya taksi dari Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Kepulauan Selayar;
- 3) satuan biaya transportasi dari hotel menuju tempat tujuan penugasan di Kecamatan Takabone Rate menggunakan moda transportasi darat dan laut diberikan pembiayaan secara *at cost*.

b. kepulangan

- 1) satuan biaya transportasi dari tempat tujuan di Kecamatan Takabone Rate menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi darat dan laut dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*;
- 2) satuan biaya taksi dari hotel/penginapan (di Kabupaten Kepulauan Selayar) ke Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
- 3) satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).

2.3. SATUAN . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

**2.3. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)**

Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*one way* atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi Yang Sama (*One Way*) terinci pada Tabel 2.4

**TABEL 2.4**  
**SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)**

| NO. | IBUKOTA PROVINSI | KABUPATEN/<br>KOTA TUJUAN | SATUAN     | BESARAN      |
|-----|------------------|---------------------------|------------|--------------|
| (1) | (2)              | (3)                       | (4)        | (5)          |
|     | ACEH             |                           |            |              |
| 1.  | Banda Aceh       | Kab. Aceh Barat           | Orang/Kali | Rp275.000,00 |
| 2.  | Banda Aceh       | Kab. Aceh Barat Daya      | Orang/Kali | Rp298.000,00 |
| 3.  | Banda Aceh       | Kab. Aceh Besar           | Orang/Kali | Rp183.000,00 |
| 4.  | Banda Aceh       | Kab. Aceh Jaya            | Orang/Kali | Rp238.000,00 |
| 5.  | Banda Aceh       | Kab. Aceh Selatan         | Orang/Kali | Rp325.000,00 |
| 6.  | Banda Aceh       | Kab. Aceh Singkil         | Orang/Kali | Rp420.000,00 |

7. Banda Aceh . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 19 -

| NO.                   | IBUKOTA PROVINSI | KABUPATEN/<br>KOTA TUJUAN | SATUAN     | BESARAN      |
|-----------------------|------------------|---------------------------|------------|--------------|
| 7.                    | Banda Aceh       | Kab. Aceh Tamiang         | Orang/Kali | Rp315.000,00 |
| 8.                    | Banda Aceh       | Kab. Aceh Tengah          | Orang/Kali | Rp293.000,00 |
| 9.                    | Banda Aceh       | Kab. Aceh Tenggara        | Orang/Kali | Rp460.000,00 |
| 10.                   | Banda Aceh       | Kab. Aceh Timur           | Orang/Kali | Rp289.000,00 |
| 11.                   | Banda Aceh       | Kab. Aceh Utara           | Orang/Kali | Rp270.000,00 |
| 12.                   | Banda Aceh       | Kab. Bener Meriah         | Orang/Kali | Rp278.000,00 |
| 13.                   | Banda Aceh       | Kab. Bireuen              | Orang/Kali | Rp220.000,00 |
| 14.                   | Banda Aceh       | Kab. Gayo Lues            | Orang/Kali | Rp370.000,00 |
| 15.                   | Banda Aceh       | Kab. Nagan Raya           | Orang/Kali | Rp275.000,00 |
| 16.                   | Banda Aceh       | Kab. Pidie                | Orang/Kali | Rp190.000,00 |
| 17.                   | Banda Aceh       | Kab. Pidie Jaya           | Orang/Kali | Rp205.000,00 |
| 18.                   | Banda Aceh       | Kota Langsa               | Orang/Kali | Rp301.000,00 |
| 19.                   | Banda Aceh       | Kota Lhokseumawe          | Orang/Kali | Rp240.000,00 |
| 20.                   | Banda Aceh       | Kota Subulussalam         | Orang/Kali | Rp400.000,00 |
| <b>SUMATERA UTARA</b> |                  |                           |            |              |
| 21.                   | Medan            | Kab. Asahan               | Orang/Kali | Rp259.000,00 |
| 22.                   | Medan            | Kab. Batubara             | Orang/Kali | Rp225.000,00 |
| 23.                   | Medan            | Kab. Dairi                | Orang/Kali | Rp270.000,00 |
| 24.                   | Medan            | Kab. Deli Serdang         | Orang/Kali | Rp186.000,00 |
| 25.                   | Medan            | Kab. Humbang Hasundutan   | Orang/Kali | Rp300.000,00 |
| 26.                   | Medan            | Kab. Karo                 | Orang/Kali | Rp200.000,00 |
| 27.                   | Medan            | Kab. Labuhan Batu         | Orang/Kali | Rp287.000,00 |
| 28.                   | Medan            | Kab. Labuhan Batu Selatan | Orang/Kali | Rp360.000,00 |
| 29.                   | Medan            | Kab. Labuhan Batu Utara   | Orang/Kali | Rp300.000,00 |
| 30.                   | Medan            | Kab. Langkat              | Orang/Kali | Rp186.000,00 |
| 31.                   | Medan            | Kab. Mandailing Natal     | Orang/Kali | Rp420.000,00 |
| 32.                   | Medan            | Kab. Padang Lawas         | Orang/Kali | Rp420.000,00 |
| 33.                   | Medan            | Kab. Padang Lawas Utara   | Orang/Kali | Rp420.000,00 |

34. Medan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 20 -

| NO.            | IBUKOTA PROVINSI | KABUPATEN/<br>KOTA TUJUAN | SATUAN     | BESARAN      |
|----------------|------------------|---------------------------|------------|--------------|
| 34.            | Medan            | Kab. Pakpak Bharat        | Orang/Kali | Rp300.000,00 |
| 35.            | Medan            | Kab. Samosir              | Orang/Kali | Rp330.000,00 |
| 36.            | Medan            | Kab. Serdang Bedagai      | Orang/Kali | Rp200.000,00 |
| 37.            | Medan            | Kab. Simalungun           | Orang/Kali | Rp264.000,00 |
| 38.            | Medan            | Kab. Tapanuli Selatan     | Orang/Kali | Rp328.000,00 |
| 39.            | Medan            | Kab. Tapanuli Tengah      | Orang/Kali | Rp345.000,00 |
| 40.            | Medan            | Kab. Tapanuli Utara       | Orang/Kali | Rp330.000,00 |
| 41.            | Medan            | Kab. Toba                 | Orang/Kali | Rp300.000,00 |
| 42.            | Medan            | Kota Binjai               | Orang/Kali | Rp180.000,00 |
| 43.            | Medan            | Kota Pematang Siantar     | Orang/Kali | Rp225.000,00 |
| 44.            | Medan            | Kota Sibolga              | Orang/Kali | Rp345.000,00 |
| 45.            | Medan            | Kota Tanjung Balai        | Orang/Kali | Rp285.000,00 |
| 46.            | Medan            | Kota Tebing Tinggi        | Orang/Kali | Rp203.000,00 |
| RIAU           |                  |                           |            |              |
| 47.            | Pekanbaru        | Kab. Indragiri Hilir      | Orang/Kali | Rp380.000,00 |
| 48.            | Pekanbaru        | Kab. Indragiri Hulu       | Orang/Kali | Rp315.000,00 |
| 49.            | Pekanbaru        | Kab. Kampar               | Orang/Kali | Rp200.000,00 |
| 50.            | Pekanbaru        | Kab. Kuantan Singingi     | Orang/Kali | Rp300.000,00 |
| 51.            | Pekanbaru        | Kab. Pelalawan            | Orang/Kali | Rp225.000,00 |
| 52.            | Pekanbaru        | Kab. Rokan Hilir          | Orang/Kali | Rp350.000,00 |
| 53.            | Pekanbaru        | Kab. Rokan Hulu           | Orang/Kali | Rp322.000,00 |
| 54.            | Pekanbaru        | Kab. Siak                 | Orang/Kali | Rp350.000,00 |
| 55.            | Pekanbaru        | Kota Dumai                | Orang/Kali | Rp400.000,00 |
| KEPULAUAN RIAU |                  |                           |            |              |
| 56.            | Tanjung Pinang   | Kab. Bintan               | Orang/Kali | Rp185.000,00 |
| JAMBI          |                  |                           |            |              |
| 57.            | Jambi            | Kab. Batanghari           | Orang/Kali | Rp175.000,00 |
| 58.            | Jambi            | Kab. Bungo                | Orang/Kali | Rp270.000,00 |

59. Jambi . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 21 -

| NO.              | IBUKOTA PROVINSI | KABUPATEN/<br>KOTA TUJUAN | SATUAN     | BESARAN      |
|------------------|------------------|---------------------------|------------|--------------|
| 59.              | Jambi            | Kab. Kerinci              | Orang/Kali | Rp325.000,00 |
| 60.              | Jambi            | Kab. Merangin             | Orang/Kali | Rp260.000,00 |
| 61.              | Jambi            | Kab. Muaro Jambi          | Orang/Kali | Rp170.000,00 |
| 62.              | Jambi            | Kab. Sarolangun           | Orang/Kali | Rp241.000,00 |
| 63.              | Jambi            | Kab. Tanjung Jabung Barat | Orang/Kali | Rp225.000,00 |
| 64.              | Jambi            | Kab. Tanjung Jabung Timur | Orang/Kali | Rp190.000,00 |
| 65.              | Jambi            | Kab. Tebo                 | Orang/Kali | Rp250.000,00 |
| 66.              | Jambi            | Kota Sungai Penuh         | Orang/Kali | Rp308.000,00 |
| SUMATERA BARAT   |                  |                           |            |              |
| 67.              | Padang           | Kab. Agam                 | Orang/Kali | Rp225.000,00 |
| 68.              | Padang           | Kab. Dharmasraya          | Orang/Kali | Rp250.000,00 |
| 69.              | Padang           | Kab. Lima Puluh Kota      | Orang/Kali | Rp225.000,00 |
| 70.              | Padang           | Kab. Padang Pariaman      | Orang/Kali | Rp205.000,00 |
| 71.              | Padang           | Kab. Pasaman              | Orang/Kali | Rp250.000,00 |
| 72.              | Padang           | Kab. Pasaman Barat        | Orang/Kali | Rp250.000,00 |
| 73.              | Padang           | Kab. Pesisir Selatan      | Orang/Kali | Rp205.000,00 |
| 74.              | Padang           | Kab. Sijunjung            | Orang/Kali | Rp225.000,00 |
| 75.              | Padang           | Kab. Solok                | Orang/Kali | Rp210.000,00 |
| 76.              | Padang           | Kab. Solok Selatan        | Orang/Kali | Rp250.000,00 |
| 77.              | Padang           | Kab. Tanah Datar          | Orang/Kali | Rp220.000,00 |
| 78.              | Padang           | Kota Bukit Tinggi         | Orang/Kali | Rp215.000,00 |
| 79.              | Padang           | Kota Padang Panjang       | Orang/Kali | Rp210.000,00 |
| 80.              | Padang           | Kota Pariaman             | Orang/Kali | Rp200.000,00 |
| 81.              | Padang           | Kota Payakumbuh           | Orang/Kali | Rp225.000,00 |
| 82.              | Padang           | Kota Sawahlunto           | Orang/Kali | Rp215.000,00 |
| 83.              | Padang           | Kota Solok                | Orang/Kali | Rp210.000,00 |
| SUMATERA SELATAN |                  |                           |            |              |
| 84.              | Palembang        | Kab. Banyuasin            | Orang/Kali | Rp203.000,00 |

85. Palembang . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 22 -

| NO.            | IBUKOTA PROVINSI | KABUPATEN/<br>KOTA TUJUAN      | SATUAN     | BESARAN      |
|----------------|------------------|--------------------------------|------------|--------------|
| 85.            | Palembang        | Kab. Empat Lawang              | Orang/Kali | Rp315.000,00 |
| 86.            | Palembang        | Kab. Lahat                     | Orang/Kali | Rp250.000,00 |
| 87.            | Palembang        | Kab. Muara Enim                | Orang/Kali | Rp235.000,00 |
| 88.            | Palembang        | Kab. Musi Banyuasin            | Orang/Kali | Rp235.000,00 |
| 89.            | Palembang        | Kab. Musi Rawas                | Orang/Kali | Rp320.000,00 |
| 90.            | Palembang        | Kab. Musi Rawas Utara          | Orang/Kali | Rp325.000,00 |
| 91.            | Palembang        | Kab. Ogan Ilir                 | Orang/Kali | Rp205.000,00 |
| 92.            | Palembang        | Kab. Ogan Komering Ilir        | Orang/Kali | Rp205.000,00 |
| 93.            | Palembang        | Kab. Ogan Komering Ulu         | Orang/Kali | Rp248.000,00 |
| 94.            | Palembang        | Kab. Ogan Komering Ulu Selatan | Orang/Kali | Rp250.000,00 |
| 95.            | Palembang        | Kab. Ogan Komering Ulu Timur   | Orang/Kali | Rp245.000,00 |
| 96.            | Palembang        | Kab. Pali                      | Orang/Kali | Rp265.000,00 |
| 97.            | Palembang        | Kota Lubuk Linggau             | Orang/Kali | Rp290.000,00 |
| 98.            | Palembang        | Kota Pagar Alam                | Orang/Kali | Rp280.000,00 |
| 99.            | Palembang        | Kota Prabumulih                | Orang/Kali | Rp205.000,00 |
| <b>LAMPUNG</b> |                  |                                |            |              |
| 100.           | Bandar Lampung   | Kab. Lampung Barat             | Orang/Kali | Rp270.000,00 |
| 101.           | Bandar Lampung   | Kab. Lampung Selatan           | Orang/Kali | Rp234.000,00 |
| 102.           | Bandar Lampung   | Kab. Lampung Tengah            | Orang/Kali | Rp246.000,00 |
| 103.           | Bandar Lampung   | Kab. Lampung Timur             | Orang/Kali | Rp246.000,00 |
| 104.           | Bandar Lampung   | Kab. Lampung Utara             | Orang/Kali | Rp252.000,00 |
| 105.           | Bandar Lampung   | Kab. Mesuji                    | Orang/Kali | Rp276.000,00 |
| 106.           | Bandar Lampung   | Kab. Pesawaran                 | Orang/Kali | Rp216.000,00 |
| 107.           | Bandar Lampung   | Kab. Pesisir Barat             | Orang/Kali | Rp200.000,00 |
| 108.           | Bandar Lampung   | Kab. Pringsewu                 | Orang/Kali | Rp222.000,00 |
| 109.           | Bandar Lampung   | Kab. Tanggamus                 | Orang/Kali | Rp240.000,00 |
| 110.           | Bandar Lampung   | Kab. Tulang Bawang             | Orang/Kali | Rp252.000,00 |

111. Bandar Lampung . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 23 -

| NO.                    | IBUKOTA PROVINSI | KABUPATEN/<br>KOTA TUJUAN | SATUAN     | BESARAN      |
|------------------------|------------------|---------------------------|------------|--------------|
| 111.                   | Bandar Lampung   | Kab. Tulang Bawang Barat  | Orang/Kali | Rp267.000,00 |
| 112.                   | Bandar Lampung   | Kab. Way Kanan            | Orang/Kali | Rp270.000,00 |
| 113.                   | Bandar Lampung   | Kota Metro                | Orang/Kali | Rp234.000,00 |
| <b>BENGKULU</b>        |                  |                           |            |              |
| 114.                   | Bengkulu         | Kab. Bengkulu Selatan     | Orang/Kali | Rp344.000,00 |
| 115.                   | Bengkulu         | Kab. Bengkulu Tengah      | Orang/Kali | Rp232.000,00 |
| 116.                   | Bengkulu         | Kab. Bengkulu Utara       | Orang/Kali | Rp313.000,00 |
| 117.                   | Bengkulu         | Kab. Kaur                 | Orang/Kali | Rp385.000,00 |
| 118.                   | Bengkulu         | Kab. Kepahiang            | Orang/Kali | Rp298.000,00 |
| 119.                   | Bengkulu         | Kab. Lebong               | Orang/Kali | Rp375.000,00 |
| 120.                   | Bengkulu         | Kab. Mukomuko             | Orang/Kali | Rp423.000,00 |
| 121.                   | Bengkulu         | Kab. Rejang Lebong        | Orang/Kali | Rp313.000,00 |
| 122.                   | Bengkulu         | Kab. Seluma               | Orang/Kali | Rp282.000,00 |
| <b>BANGKA BELITUNG</b> |                  |                           |            |              |
| 123.                   | Pangkalpinang    | Kab. Bangka               | Orang/Kali | Rp250.000,00 |
| 124.                   | Pangkalpinang    | Kab. Bangka Barat         | Orang/Kali | Rp275.000,00 |
| 125.                   | Pangkalpinang    | Kab. Bangka Selatan       | Orang/Kali | Rp275.000,00 |
| 126.                   | Pangkalpinang    | Kab. Bangka Tengah        | Orang/Kali | Rp250.000,00 |
| <b>BANTEN</b>          |                  |                           |            |              |
| 127.                   | Serang           | Kab. Lebak                | Orang/Kali | Rp208.000,00 |
| 128.                   | Serang           | Kab. Pandeglang           | Orang/Kali | Rp138.000,00 |
| 129.                   | Serang           | Kab. Serang               | Orang/Kali | Rp160.000,00 |
| 130.                   | Serang           | Kab. Tangerang            | Orang/Kali | Rp254.000,00 |
| 131.                   | Serang           | Kota Cilegon              | Orang/Kali | Rp160.000,00 |
| 132.                   | Serang           | Kota Tangerang            | Orang/Kali | Rp313.000,00 |
| 133.                   | Serang           | Kota Tangerang Selatan    | Orang/Kali | Rp347.000,00 |
| <b>JAWA BARAT</b>      |                  |                           |            |              |
| 134.                   | Bandung          | Kab. Bandung              | Orang/Kali | Rp183.000,00 |

135. Bandung . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 24 -

| NO.         | IBUKOTA PROVINSI | KABUPATEN/<br>KOTA TUJUAN | SATUAN     | BESARAN      |
|-------------|------------------|---------------------------|------------|--------------|
| 135.        | Bandung          | Kab. Bandung Barat        | Orang/Kali | Rp275.000,00 |
| 136.        | Bandung          | Kab. Bekasi               | Orang/Kali | Rp265.000,00 |
| 137.        | Bandung          | Kab. Bogor                | Orang/Kali | Rp185.000,00 |
| 138.        | Bandung          | Kab. Ciamis               | Orang/Kali | Rp245.000,00 |
| 139.        | Bandung          | Kab. Cianjur              | Orang/Kali | Rp215.000,00 |
| 140.        | Bandung          | Kab. Cirebon              | Orang/Kali | Rp280.000,00 |
| 141.        | Bandung          | Kab. Garut                | Orang/Kali | Rp243.000,00 |
| 142.        | Bandung          | Kab. Indramayu            | Orang/Kali | Rp275.000,00 |
| 143.        | Bandung          | Kab. Karawang             | Orang/Kali | Rp248.000,00 |
| 144.        | Bandung          | Kab. Kuningan             | Orang/Kali | Rp275.000,00 |
| 145.        | Bandung          | Kab. Majalengka           | Orang/Kali | Rp235.000,00 |
| 146.        | Bandung          | Kab. Pangadaran           | Orang/Kali | Rp283.000,00 |
| 147.        | Bandung          | Kab. Purwakarta           | Orang/Kali | Rp218.000,00 |
| 148.        | Bandung          | Kab. Subang               | Orang/Kali | Rp208.000,00 |
| 149.        | Bandung          | Kab. Sukabumi             | Orang/Kali | Rp245.000,00 |
| 150.        | Bandung          | Kab. Sumedang             | Orang/Kali | Rp230.000,00 |
| 151.        | Bandung          | Kab. Tasikmalaya          | Orang/Kali | Rp245.000,00 |
| 152.        | Bandung          | Kota Banjar               | Orang/Kali | Rp283.000,00 |
| 153.        | Bandung          | Kota Bekasi               | Orang/Kali | Rp265.000,00 |
| 154.        | Bandung          | Kota Bogor                | Orang/Kali | Rp285.000,00 |
| 155.        | Bandung          | Kota Cimahi               | Orang/Kali | Rp168.000,00 |
| 156.        | Bandung          | Kota Cirebon              | Orang/Kali | Rp270.000,00 |
| 157.        | Bandung          | Kota Depok                | Orang/Kali | Rp275.000,00 |
| 158.        | Bandung          | Kota Sukabumi             | Orang/Kali | Rp226.000,00 |
| 159.        | Bandung          | Kota Tasikmalaya          | Orang/Kali | Rp245.000,00 |
| JAWA TENGAH |                  |                           |            |              |
| 160.        | Semarang         | Kab. Banjarnegara         | Orang/Kali | Rp260.000,00 |
| 161.        | Semarang         | Kab. Banyumas             | Orang/Kali | Rp257.000,00 |

162. Semarang . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 25 -

| NO.  | IBUKOTA PROVINSI | KABUPATEN/<br>KOTA TUJUAN | SATUAN     | BESARAN      |
|------|------------------|---------------------------|------------|--------------|
| 162. | Semarang         | Kab. Batang               | Orang/Kali | Rp240.000,00 |
| 163. | Semarang         | Kab. Blora                | Orang/Kali | Rp270.000,00 |
| 164. | Semarang         | Kab. Boyolali             | Orang/Kali | Rp240.000,00 |
| 165. | Semarang         | Kab. Brebes               | Orang/Kali | Rp263.000,00 |
| 166. | Semarang         | Kab. Cilacap              | Orang/Kali | Rp280.000,00 |
| 167. | Semarang         | Kab. Demak                | Orang/Kali | Rp230.000,00 |
| 168. | Semarang         | Kab. Grobogan             | Orang/Kali | Rp235.000,00 |
| 169. | Semarang         | Kab. Jepara               | Orang/Kali | Rp240.000,00 |
| 170. | Semarang         | Kab. Karanganyar          | Orang/Kali | Rp250.000,00 |
| 171. | Semarang         | Kab. Kebumen              | Orang/Kali | Rp260.000,00 |
| 172. | Semarang         | Kab. Kendal               | Orang/Kali | Rp230.000,00 |
| 173. | Semarang         | Kab. Klaten               | Orang/Kali | Rp250.000,00 |
| 174. | Semarang         | Kab. Kudus                | Orang/Kali | Rp235.000,00 |
| 175. | Semarang         | Kab. Magelang             | Orang/Kali | Rp240.000,00 |
| 176. | Semarang         | Kab. Pati                 | Orang/Kali | Rp240.000,00 |
| 177. | Semarang         | Kab. Pekalongan           | Orang/Kali | Rp245.000,00 |
| 178. | Semarang         | Kab. Pemalang             | Orang/Kali | Rp250.000,00 |
| 179. | Semarang         | Kab. Purbalingga          | Orang/Kali | Rp270.000,00 |
| 180. | Semarang         | Kab. Purworejo            | Orang/Kali | Rp250.000,00 |
| 181. | Semarang         | Kab. Rembang              | Orang/Kali | Rp250.000,00 |
| 182. | Semarang         | Kab. Semarang             | Orang/Kali | Rp230.000,00 |
| 183. | Semarang         | Kab. Sragen               | Orang/Kali | Rp250.000,00 |
| 184. | Semarang         | Kab. Sukoharjo            | Orang/Kali | Rp250.000,00 |
| 185. | Semarang         | Kab. Tegal                | Orang/Kali | Rp260.000,00 |
| 186. | Semarang         | Kab. Temanggung           | Orang/Kali | Rp240.000,00 |
| 187. | Semarang         | Kab. Wonogiri             | Orang/Kali | Rp250.000,00 |
| 188. | Semarang         | Kab. Wonosobo             | Orang/Kali | Rp250.000,00 |
| 189. | Semarang         | Kota Magelang             | Orang/Kali | Rp240.000,00 |

190. Semarang . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 26 -

| NO.             | IBUKOTA PROVINSI | KABUPATEN/<br>KOTA TUJUAN | SATUAN     | BESARAN      |
|-----------------|------------------|---------------------------|------------|--------------|
| 190.            | Semarang         | Kota Pekalongan           | Orang/Kali | Rp245.000,00 |
| 191.            | Semarang         | Kota Salatiga             | Orang/Kali | Rp235.000,00 |
| 192.            | Semarang         | Kota Surakarta            | Orang/Kali | Rp245.000,00 |
| 193.            | Semarang         | Kota Tegal                | Orang/Kali | Rp260.000,00 |
| D.I. YOGYAKARTA |                  |                           |            |              |
| 194.            | Yogyakarta       | Kab. Bantul               | Orang/Kali | Rp250.000,00 |
| 195.            | Yogyakarta       | Kab. Gunung Kidul         | Orang/Kali | Rp350.000,00 |
| 196.            | Yogyakarta       | Kab. Kulon Progo          | Orang/Kali | Rp350.000,00 |
| 197.            | Yogyakarta       | Kab. Sleman               | Orang/Kali | Rp200.000,00 |
| JAWA TIMUR      |                  |                           |            |              |
| 198.            | Surabaya         | Kab. Bangkalan            | Orang/Kali | Rp225.000,00 |
| 199.            | Surabaya         | Kab. Banyuwangi           | Orang/Kali | Rp285.000,00 |
| 200.            | Surabaya         | Kab. Blitar               | Orang/Kali | Rp255.000,00 |
| 201.            | Surabaya         | Kab. Bojonegoro           | Orang/Kali | Rp225.000,00 |
| 202.            | Surabaya         | Kab. Bondowoso            | Orang/Kali | Rp255.000,00 |
| 203.            | Surabaya         | Kab. Gresik               | Orang/Kali | Rp225.000,00 |
| 204.            | Surabaya         | Kab. Jember               | Orang/Kali | Rp261.000,00 |
| 205.            | Surabaya         | Kab. Jombang              | Orang/Kali | Rp235.000,00 |
| 206.            | Surabaya         | Kab. Kediri               | Orang/Kali | Rp235.000,00 |
| 207.            | Surabaya         | Kab. Lamongan             | Orang/Kali | Rp225.000,00 |
| 208.            | Surabaya         | Kab. Lumajang             | Orang/Kali | Rp261.000,00 |
| 209.            | Surabaya         | Kab. Madiun               | Orang/Kali | Rp245.000,00 |
| 210.            | Surabaya         | Kab. Magetan              | Orang/Kali | Rp253.000,00 |
| 211.            | Surabaya         | Kab. Malang               | Orang/Kali | Rp228.000,00 |
| 212.            | Surabaya         | Kab. Mojokerto            | Orang/Kali | Rp225.000,00 |
| 213.            | Surabaya         | Kab. Nganjuk              | Orang/Kali | Rp245.000,00 |
| 214.            | Surabaya         | Kab. Ngawi                | Orang/Kali | Rp253.000,00 |
| 215.            | Surabaya         | Kab. Pacitan              | Orang/Kali | Rp285.000,00 |

216. Surabaya . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 27 -

| NO.  | IBUKOTA PROVINSI | KABUPATEN/<br>KOTA TUJUAN | SATUAN     | BESARAN      |
|------|------------------|---------------------------|------------|--------------|
| 216. | Surabaya         | Kab. Pamekasan            | Orang/Kali | Rp243.000,00 |
| 217. | Surabaya         | Kab. Pasuruan             | Orang/Kali | Rp228.000,00 |
| 218. | Surabaya         | Kab. Ponorogo             | Orang/Kali | Rp255.000,00 |
| 219. | Surabaya         | Kab. Probolinggo          | Orang/Kali | Rp228.000,00 |
| 220. | Surabaya         | Kab. Sampang              | Orang/Kali | Rp235.000,00 |
| 221. | Surabaya         | Kab. Sidoarjo             | Orang/Kali | Rp240.000,00 |
| 222. | Surabaya         | Kab. Situbondo            | Orang/Kali | Rp255.000,00 |
| 223. | Surabaya         | Kab. Sumenep              | Orang/Kali | Rp255.000,00 |
| 224. | Surabaya         | Kab. Trenggalek           | Orang/Kali | Rp245.000,00 |
| 225. | Surabaya         | Kab. Tuban                | Orang/Kali | Rp245.000,00 |
| 226. | Surabaya         | Kab. Tulungagung          | Orang/Kali | Rp245.000,00 |
| 227. | Surabaya         | Kota Batu                 | Orang/Kali | Rp242.000,00 |
| 228. | Surabaya         | Kota Blitar               | Orang/Kali | Rp255.000,00 |
| 229. | Surabaya         | Kota Bojonegoro           | Orang/Kali | Rp225.000,00 |
| 230. | Surabaya         | Kota Kediri               | Orang/Kali | Rp235.000,00 |
| 231. | Surabaya         | Kota Madiun               | Orang/Kali | Rp245.000,00 |
| 232. | Surabaya         | Kota Malang               | Orang/Kali | Rp228.000,00 |
| 233. | Surabaya         | Kota Mojokerto            | Orang/Kali | Rp225.000,00 |
| 234. | Surabaya         | Kota Probolinggo          | Orang/Kali | Rp228.000,00 |
| BALI |                  |                           |            |              |
| 235. | Denpasar         | Kab. Badung               | Orang/Kali | Rp188.000,00 |
| 236. | Denpasar         | Kab. Bangli               | Orang/Kali | Rp225.000,00 |
| 237. | Denpasar         | Kab. Buleleng             | Orang/Kali | Rp265.000,00 |
| 238. | Denpasar         | Kab. Gianyar              | Orang/Kali | Rp225.000,00 |
| 239. | Denpasar         | Kab. Jembrana             | Orang/Kali | Rp270.000,00 |
| 240. | Denpasar         | Kab. Karangasem           | Orang/Kali | Rp263.000,00 |
| 241. | Denpasar         | Kab. Tabanan              | Orang/Kali | Rp225.000,00 |

NUSA TENGGARA BARAT . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

| NO.                 | IBUKOTA PROVINSI | KABUPATEN/<br>KOTA TUJUAN | SATUAN     | BESARAN      |
|---------------------|------------------|---------------------------|------------|--------------|
| NUSA TENGGARA BARAT |                  |                           |            |              |
| 242.                | Mataram          | Kab. Lombok Barat         | Orang/Kali | Rp325.000,00 |
| 243.                | Mataram          | Kab. Lombok Tengah        | Orang/Kali | Rp450.000,00 |
| 244.                | Mataram          | Kab. Lombok Timur         | Orang/Kali | Rp350.000,00 |
| NUSA TENGGARA TIMUR |                  |                           |            |              |
| 245.                | Kupang           | Kab. Belu                 | Orang/Kali | Rp325.000,00 |
| 246.                | Kupang           | Kab. Kupang               | Orang/Kali | Rp175.000,00 |
| 247.                | Kupang           | Kab. Timor Tengah Selatan | Orang/Kali | Rp218.000,00 |
| 248.                | Kupang           | Kab. Timor Tengah Utara   | Orang/Kali | Rp275.000,00 |
| KALIMANTAN BARAT    |                  |                           |            |              |
| 249.                | Pontianak        | Kab. Bengkayang           | Orang/Kali | Rp270.000,00 |
| 250.                | Pontianak        | Kab. Kapuas Hulu          | Orang/Kali | Rp550.000,00 |
| 251.                | Pontianak        | Kab. Kayong Utara         | Orang/Kali | Rp550.000,00 |
| 252.                | Pontianak        | Kab. Ketapang             | Orang/Kali | Rp550.000,00 |
| 253.                | Pontianak        | Kab. Kubu Raya            | Orang/Kali | Rp185.000,00 |
| 254.                | Pontianak        | Kab. Landak               | Orang/Kali | Rp270.000,00 |
| 255.                | Pontianak        | Kab. Melawi               | Orang/Kali | Rp430.000,00 |
| 256.                | Pontianak        | Kab. Mempawah             | Orang/Kali | Rp230.000,00 |
| 257.                | Pontianak        | Kab. Sambas               | Orang/Kali | Rp300.000,00 |
| 258.                | Pontianak        | Kab. Sanggau              | Orang/Kali | Rp303.000,00 |
| 259.                | Pontianak        | Kab. Sekadau              | Orang/Kali | Rp343.000,00 |
| 260.                | Pontianak        | Kab. Sintang              | Orang/Kali | Rp392.000,00 |
| 261.                | Pontianak        | Kota Singkawang           | Orang/Kali | Rp257.000,00 |
| KALIMANTAN TENGAH   |                  |                           |            |              |
| 262.                | Palangkaraya     | Kab. Barito Selatan       | Orang/Kali | Rp290.000,00 |
| 263.                | Palangkaraya     | Kab. Barito Timur         | Orang/Kali | Rp333.000,00 |
| 264.                | Palangkaraya     | Kab. Barito Utara         | Orang/Kali | Rp425.000,00 |
| 265.                | Palangkaraya     | Kab. Gunung Mas           | Orang/Kali | Rp300.000,00 |

266. Palangkaraya . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 29 -

| NO.                | IBUKOTA PROVINSI | KABUPATEN/<br>KOTA TUJUAN | SATUAN     | BESARAN        |
|--------------------|------------------|---------------------------|------------|----------------|
| 266.               | Palangkaraya     | Kab. Kapuas               | Orang/Kali | Rp275.000,00   |
| 267.               | Palangkaraya     | Kab. Katingan             | Orang/Kali | Rp250.000,00   |
| 268.               | Palangkaraya     | Kab. Kotawaringin Barat   | Orang/Kali | Rp425.000,00   |
| 269.               | Palangkaraya     | Kab. Kotawaringin Timur   | Orang/Kali | Rp300.000,00   |
| 270.               | Palangkaraya     | Kab. Lamandau             | Orang/Kali | Rp525.000,00   |
| 271.               | Palangkaraya     | Kab. Murung Raya          | Orang/Kali | Rp448.000,00   |
| 272.               | Palangkaraya     | Kab. Pulau Pisau          | Orang/Kali | Rp250.000,00   |
| 273.               | Palangkaraya     | Kab. Seruyan              | Orang/Kali | Rp328.000,00   |
| 274.               | Palangkaraya     | Kab. Sukamara             | Orang/Kali | Rp525.000,00   |
| KALIMANTAN SELATAN |                  |                           |            |                |
| 275.               | Banjarmasin      | Kab. Balangan             | Orang/Kali | Rp230.000,00   |
| 276.               | Banjarmasin      | Kab. Banjar               | Orang/Kali | Rp170.000,00   |
| 277.               | Banjarmasin      | Kab. Barito Kuala         | Orang/Kali | Rp200.000,00   |
| 278.               | Banjarmasin      | Kab. Hulu Sungai Selatan  | Orang/Kali | Rp200.000,00   |
| 279.               | Banjarmasin      | Kab. Hulu Sungai Tengah   | Orang/Kali | Rp212.000,00   |
| 280.               | Banjarmasin      | Kab. Hulu Sungai Utara    | Orang/Kali | Rp218.000,00   |
| 281.               | Banjarmasin      | Kab. Kota Baru            | Orang/Kali | Rp290.000,00   |
| 282.               | Banjarmasin      | Kab. Tabalong             | Orang/Kali | Rp234.000,00   |
| 283.               | Banjarmasin      | Kab. Tanah Bumbu          | Orang/Kali | Rp300.000,00   |
| 284.               | Banjarmasin      | Kab. Tanah Laut           | Orang/Kali | Rp200.000,00   |
| 285.               | Banjarmasin      | Kab. Tapin                | Orang/Kali | Rp189.000,00   |
| 286.               | Banjarmasin      | Kota Banjarbaru           | Orang/Kali | Rp225.000,00   |
| KALIMANTAN TIMUR   |                  |                           |            |                |
| 287.               | Samarinda        | Kab. Kutai Barat          | Orang/Kali | Rp1.500.000,00 |
| 288.               | Samarinda        | Kab. Kutai Kartanegara    | Orang/Kali | Rp500.000,00   |
| 289.               | Samarinda        | Kab. Kutai Timur          | Orang/Kali | Rp1.350.000,00 |
| 290.               | Samarinda        | Kab. Paser                | Orang/Kali | Rp1.650.000,00 |
| 291.               | Samarinda        | Kab. Penajam Paser Utara  | Orang/Kali | Rp650.000,00   |

292. Samarinda . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 30 -

| NO.            | IBUKOTA PROVINSI | KABUPATEN/<br>KOTA TUJUAN      | SATUAN     | BESARAN      |
|----------------|------------------|--------------------------------|------------|--------------|
| 292.           | Samarinda        | Kota Balikpapan                | Orang/Kali | Rp550.000,00 |
| 293.           | Samarinda        | Kota Bontang                   | Orang/Kali | Rp600.000,00 |
| SULAWESI UTARA |                  |                                |            |              |
| 294.           | Manado           | Kab. Bolaang Mongondow         | Orang/Kali | Rp250.000,00 |
| 295.           | Manado           | Kab. Bolaang Mongondow Selatan | Orang/Kali | Rp275.000,00 |
| 296.           | Manado           | Kab. Bolaang Mongondow Timur   | Orang/Kali | Rp250.000,00 |
| 297.           | Manado           | Kab. Bolaang Mongondow Utara   | Orang/Kali | Rp300.000,00 |
| 298.           | Manado           | Kab. Minahasa                  | Orang/Kali | Rp180.000,00 |
| 299.           | Manado           | Kab. Minahasa Selatan          | Orang/Kali | Rp180.000,00 |
| 300.           | Manado           | Kab. Minahasa Tenggara         | Orang/Kali | Rp200.000,00 |
| 301.           | Manado           | Kab. Minahasa Utara            | Orang/Kali | Rp175.000,00 |
| 302.           | Manado           | Kota Bitung                    | Orang/Kali | Rp175.000,00 |
| 303.           | Manado           | Kota Kotamobagu                | Orang/Kali | Rp250.000,00 |
| 304.           | Manado           | Kota Tomohon                   | Orang/Kali | Rp170.000,00 |
| GORONTALO      |                  |                                |            |              |
| 305.           | Gorontalo        | Kab. Boalemo                   | Orang/Kali | Rp400.000,00 |
| 306.           | Gorontalo        | Kab. Gorontalo                 | Orang/Kali | Rp300.000,00 |
| 307.           | Gorontalo        | Kab. Gorontalo Utara           | Orang/Kali | Rp350.000,00 |
| 308.           | Gorontalo        | Kab. Pahuwato                  | Orang/Kali | Rp650.000,00 |
| SULAWESI BARAT |                  |                                |            |              |
| 309.           | Mamuju           | Kab. Majene                    | Orang/Kali | Rp240.000,00 |
| 310.           | Mamuju           | Kab. Mamasa                    | Orang/Kali | Rp359.000,00 |
| 311.           | Mamuju           | Kab. Mamuju Tengah             | Orang/Kali | Rp200.000,00 |
| 312.           | Mamuju           | Kab. Pasangkayu                | Orang/Kali | Rp270.000,00 |
| 313.           | Mamuju           | Kab. Polewali Mandar           | Orang/Kali | Rp260.000,00 |

SULAWESI SELATAN . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 31 -

| NO.                     | IBUKOTA PROVINSI | KABUPATEN/<br>KOTA TUJUAN | SATUAN     | BESARAN      |
|-------------------------|------------------|---------------------------|------------|--------------|
| <b>SULAWESI SELATAN</b> |                  |                           |            |              |
| 314.                    | Makassar         | Kab. Bantaeng             | Orang/Kali | Rp235.000,00 |
| 315.                    | Makassar         | Kab. Barru                | Orang/Kali | Rp210.000,00 |
| 316.                    | Makassar         | Kab. Bone                 | Orang/Kali | Rp240.000,00 |
| 317.                    | Makassar         | Kab. Bulukumba            | Orang/Kali | Rp240.000,00 |
| 318.                    | Makassar         | Kab. Enrekang             | Orang/Kali | Rp250.000,00 |
| 319.                    | Makassar         | Kab. Gowa                 | Orang/Kali | Rp175.000,00 |
| 320.                    | Makassar         | Kab. Jeneponto            | Orang/Kali | Rp230.000,00 |
| 321.                    | Makassar         | Kab. Luwu                 | Orang/Kali | Rp350.000,00 |
| 322.                    | Makassar         | Kab. Luwu Timur           | Orang/Kali | Rp375.000,00 |
| 323.                    | Makassar         | Kab. Luwu Utara           | Orang/Kali | Rp365.000,00 |
| 324.                    | Makassar         | Kab. Maros                | Orang/Kali | Rp170.000,00 |
| 325.                    | Makassar         | Kab. Pinrang              | Orang/Kali | Rp230.000,00 |
| 326.                    | Makassar         | Kab. Sidenreng Rappang    | Orang/Kali | Rp230.000,00 |
| 327.                    | Makassar         | Kab. Sinjai               | Orang/Kali | Rp235.000,00 |
| 328.                    | Makassar         | Kab. Soppeng              | Orang/Kali | Rp235.000,00 |
| 329.                    | Makassar         | Kab. Takalar              | Orang/Kali | Rp190.000,00 |
| 330.                    | Makassar         | Kab. Tanatoraja           | Orang/Kali | Rp350.000,00 |
| 331.                    | Makassar         | Kab. Toraja Utara         | Orang/Kali | Rp350.000,00 |
| 332.                    | Makassar         | Kab. Wajo                 | Orang/Kali | Rp230.000,00 |
| 333.                    | Makassar         | Kota Palopo               | Orang/Kali | Rp350.000,00 |
| 334.                    | Makassar         | Kota Pare-Pare            | Orang/Kali | Rp225.000,00 |
| <b>SULAWESI TENGAH</b>  |                  |                           |            |              |
| 335.                    | Palu             | Kab. Luwuk                | Orang/Kali | Rp400.000,00 |
| 336.                    | Palu             | Kab. Buol                 | Orang/Kali | Rp472.000,00 |
| 337.                    | Palu             | Kab. Donggala             | Orang/Kali | Rp130.000,00 |
| 338.                    | Palu             | Kab. Morowali             | Orang/Kali | Rp400.000,00 |
| 339.                    | Palu             | Kab. Morowali Utara       | Orang/Kali | Rp400.000,00 |

340. Palu . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 32 -

| NO.                      | IBUKOTA PROVINSI | KABUPATEN/<br>KOTA TUJUAN | SATUAN     | BESARAN        |
|--------------------------|------------------|---------------------------|------------|----------------|
| 340.                     | Palu             | Kab. Parigi Moutong       | Orang/Kali | Rp250.000,00   |
| 341.                     | Palu             | Kab. Poso                 | Orang/Kali | Rp280.000,00   |
| 342.                     | Palu             | Kab. Sigi                 | Orang/Kali | Rp219.000,00   |
| 343.                     | Palu             | Kab. Tojouna-Una          | Orang/Kali | Rp350.000,00   |
| 344.                     | Palu             | Kab. Toli-Toli            | Orang/Kali | Rp412.000,00   |
| <b>SULAWESI TENGGARA</b> |                  |                           |            |                |
| 345.                     | Kendari          | Kab. Bombana              | Orang/Kali | Rp355.000,00   |
| 346.                     | Kendari          | Kab. Kolaka               | Orang/Kali | Rp370.000,00   |
| 347.                     | Kendari          | Kab. Kolaka Timur         | Orang/Kali | Rp300.000,00   |
| 348.                     | Kendari          | Kab. Kolaka Utara         | Orang/Kali | Rp425.000,00   |
| 349.                     | Kendari          | Kab. Konawe               | Orang/Kali | Rp300.000,00   |
| 350.                     | Kendari          | Kab. Konawe Selatan       | Orang/Kali | Rp305.000,00   |
| 351.                     | Kendari          | Kab. Konawe Utara         | Orang/Kali | Rp300.000,00   |
| <b>MALUKU UTARA</b>      |                  |                           |            |                |
| 352.                     | Sofifi           | Kab. Halmahera Barat      | Orang/Kali | Rp850.000,00   |
| 353.                     | Sofifi           | Kab. Halmahera Tengah     | Orang/Kali | Rp1.000.000,00 |
| 354.                     | Sofifi           | Kab. Halmahera Timur      | Orang/Kali | Rp1.250.000,00 |
| 355.                     | Sofifi           | Kab. Halmahera Utara      | Orang/Kali | Rp900.000,00   |
| <b>PAPUA</b>             |                  |                           |            |                |
| 356.                     | Jayapura         | Kab. Jayapura             | Orang/Kali | Rp600.000,00   |
| 357.                     | Jayapura         | Kab. Keerom               | Orang/Kali | Rp900.000,00   |
| 358.                     | Jayapura         | Kab. Sarmi                | Orang/Kali | Rp2.700.000,00 |
| 359.                     | Jayapura         | Kab. Merauke              | Orang/Kali | Rp1.134.000,00 |
| <b>PAPUA BARAT</b>       |                  |                           |            |                |
| 360.                     | Manokwari        | Kab. Teluk Bintuni        | Orang/Kali | Rp900.000,00   |
| 361.                     | Manokwari        | Kab. Manokwari Selatan    | Orang/Kali | Rp750.000,00   |
| 362.                     | Manokwari        | Kab. Pegunungan Arfak     | Orang/Kali | Rp2.650.000,00 |
| 363.                     | Manokwari        | Kota Sorong               | Orang/Kali | Rp1.000.000,00 |

2.4. SATUAN . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

2.4. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI DKI JAKARTA KE  
KABUPATEN/KOTA SEKITAR (*ONE WAY*)

Satuan biaya transportasi dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di DKI Jakarta ke tempat tujuan di Kabupaten/Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kepulauan Seribu atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Satuan Biaya Transportasi Darat dari DKI Jakarta ke Kabupaten/Kota Sekitar (*One Way*) terinci pada Tabel 2.5

TABEL 2.5  
SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI DKI JAKARTA  
KE KABUPATEN/KOTA SEKITAR (*ONE WAY*)

| NO. | IBUKOTA<br>PROVINSI | KABUPATEN/KOTA TUJUAN  | SATUAN     | BESARAN      |
|-----|---------------------|------------------------|------------|--------------|
| (1) | (2)                 | (3)                    | (4)        | (5)          |
| 1.  | Jakarta             | Kota Bekasi            | Orang/Kali | Rp284.000,00 |
| 2.  | Jakarta             | Kab. Bekasi            | Orang/Kali | Rp284.000,00 |
| 3.  | Jakarta             | Kab. Bogor             | Orang/Kali | Rp300.000,00 |
| 4.  | Jakarta             | Kota Bogor             | Orang/Kali | Rp300.000,00 |
| 5.  | Jakarta             | Kota Depok             | Orang/Kali | Rp275.000,00 |
| 6.  | Jakarta             | Kota Tangerang         | Orang/Kali | Rp286.000,00 |
| 7.  | Jakarta             | Kota Tangerang Selatan | Orang/Kali | Rp286.000,00 |
| 8.  | Jakarta             | Kab. Tangerang         | Orang/Kali | Rp310.000,00 |
| 9.  | Jakarta             | Kepulauan Seribu       | Orang/Kali | Rp428.000,00 |

3. SATUAN . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

### 3. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan:

- a. rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara; atau
- b. rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.

Satuan Biaya Konsumsi Rapat terinci pada Tabel 2.6.

TABEL 2.6  
SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

| NO. | PROVINSI                                                  | SATUAN     | MAKAN        | KUDAPAN<br>(SNACK) |
|-----|-----------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------|
| (1) | (2)                                                       | (3)        | (4)          | (5)                |
| 1   | RAPAT KOORDINASI TINGKAT<br>KEPALA DAERAH/ESELON I/SETARA | Orang/Kali | Rp110.000,00 | Rp49.000,00        |
| 2   | RAPAT BIASA                                               |            |              |                    |
|     | 2.1 ACEH                                                  | Orang/Kali | Rp51.000,00  | Rp19.000,00        |
|     | 2.2 SUMATERA UTARA                                        | Orang/Kali | Rp47.000,00  | Rp17.000,00        |
|     | 2.3 RIAU                                                  | Orang/Kali | Rp40.000,00  | Rp16.000,00        |
|     | 2.4 KEPULAUAN RIAU                                        | Orang/Kali | Rp41.000,00  | Rp25.000,00        |
|     | 2.5 JAMBI                                                 | Orang/Kali | Rp42.000,00  | Rp17.000,00        |
|     | 2.6 SUMATERA BARAT                                        | Orang/Kali | Rp44.000,00  | Rp17.000,00        |
|     | 2.7 SUMATERA SELATAN                                      | Orang/Kali | Rp46.000,00  | Rp17.000,00        |

2.8 LAMPUNG . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 35 -

| NO. | PROVINSI                 | SATUAN     | MAKAN       | KUDAPAN<br>(SNACK) |
|-----|--------------------------|------------|-------------|--------------------|
| (1) | (2)                      | (3)        | (4)         | (5)                |
|     | 2.8 LAMPUNG              | Orang/Kali | Rp40.000,00 | Rp20.000,00        |
|     | 2.9 BENGKULU             | Orang/Kali | Rp44.000,00 | Rp16.000,00        |
|     | 2.10 BANGKA BELITUNG     | Orang/Kali | Rp40.000,00 | Rp18.000,00        |
|     | 2.11 BANTEN              | Orang/Kali | Rp54.000,00 | Rp19.000,00        |
|     | 2.12 JAWA BARAT          | Orang/Kali | Rp45.000,00 | Rp20.000,00        |
|     | 2.13 D.K.I. JAKARTA      | Orang/Kali | Rp47.000,00 | Rp22.000,00        |
|     | 2.14 JAWA TENGAH         | Orang/Kali | Rp38.000,00 | Rp15.000,00        |
|     | 2.15 D.I. YOGYAKARTA     | Orang/Kali | Rp36.000,00 | Rp15.000,00        |
|     | 2.16 JAWA TIMUR          | Orang/Kali | Rp44.000,00 | Rp23.000,00        |
|     | 2.17 BALI                | Orang/Kali | Rp48.000,00 | Rp20.000,00        |
|     | 2.18 NUSA TENGGARA BARAT | Orang/Kali | Rp41.000,00 | Rp17.000,00        |
|     | 2.19 NUSA TENGGARA TIMUR | Orang/Kali | Rp41.000,00 | Rp21.000,00        |
|     | 2.20 KALIMANTAN BARAT    | Orang/Kali | Rp44.000,00 | Rp16.000,00        |
|     | 2.21 KALIMANTAN TENGAH   | Orang/Kali | Rp40.000,00 | Rp15.000,00        |
|     | 2.22 KALIMANTAN SELATAN  | Orang/Kali | Rp45.000,00 | Rp16.000,00        |
|     | 2.23 KALIMANTAN TIMUR    | Orang/Kali | Rp43.000,00 | Rp24.000,00        |
|     | 2.24 KALIMANTAN UTARA    | Orang/Kali | Rp43.000,00 | Rp20.000,00        |
|     | 2.25 SULAWESI UTARA      | Orang/Kali | Rp55.000,00 | Rp25.000,00        |
|     | 2.26 GORONTALO           | Orang/Kali | Rp44.000,00 | Rp14.000,00        |
|     | 2.27 SULAWESI BARAT      | Orang/Kali | Rp47.000,00 | Rp20.000,00        |
|     | 2.28 SULAWESI SELATAN    | Orang/Kali | Rp48.000,00 | Rp24.000,00        |
|     | 2.29 SULAWESI TENGAH     | Orang/Kali | Rp41.000,00 | Rp17.000,00        |
|     | 2.30 SULAWESI TENGGARA   | Orang/Kali | Rp42.000,00 | Rp20.000,00        |
|     | 2.31 MALUKU              | Orang/Kali | Rp59.000,00 | Rp22.000,00        |
|     | 2.32 MALUKU UTARA        | Orang/Kali | Rp63.000,00 | Rp23.000,00        |
|     | 2.33 PAPUA               | Orang/Kali | Rp60.000,00 | Rp31.000,00        |
|     | 2.34 PAPUA BARAT         | Orang/Kali | Rp62.000,00 | Rp25.000,00        |

4. SATUAN . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 36 -

#### **4. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN**

##### **4.1. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI**

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor.

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:

- a. gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
- b. gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri terinci pada Tabel 2.7.

TABEL 2.7 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 37 -

**TABEL 2.7**

**SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI**

| NO. | PROVINSI            | SATUAN                | GEDUNG<br>BERTINGKAT | GEDUNG TIDAK<br>BERTINGKAT | HALAMAN<br>GEDUNG/<br>BANGUNAN<br>KANTOR |
|-----|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------------------|
| (1) | (2)                 | (3)                   | (4)                  | (5)                        | (6)                                      |
| 1.  | ACEH                | m <sup>2</sup> /tahun | Rp192.000,00         | Rp148.000,00               | Rp10.000,00                              |
| 2.  | SUMATERA UTARA      | m <sup>2</sup> /tahun | Rp229.000,00         | Rp171.000,00               | Rp12.000,00                              |
| 3.  | RIAU                | m <sup>2</sup> /tahun | Rp217.000,00         | Rp162.000,00               | Rp11.000,00                              |
| 4.  | KEPULAUAN RIAU      | m <sup>2</sup> /tahun | Rp244.000,00         | Rp182.000,00               | Rp13.000,00                              |
| 5.  | JAMBI               | m <sup>2</sup> /tahun | Rp204.000,00         | Rp151.000,00               | Rp11.000,00                              |
| 6.  | SUMATERA BARAT      | m <sup>2</sup> /tahun | Rp182.000,00         | Rp124.000,00               | Rp10.000,00                              |
| 7.  | SUMATERA SELATAN    | m <sup>2</sup> /tahun | Rp218.000,00         | Rp147.000,00               | Rp11.000,00                              |
| 8.  | LAMPUNG             | m <sup>2</sup> /tahun | Rp214.000,00         | Rp135.000,00               | Rp11.000,00                              |
| 9.  | BENGKULU            | m <sup>2</sup> /tahun | Rp191.000,00         | Rp128.000,00               | Rp10.000,00                              |
| 10. | BANGKA BELITUNG     | m <sup>2</sup> /tahun | Rp215.000,00         | Rp136.000,00               | Rp11.000,00                              |
| 11. | BANTEN              | m <sup>2</sup> /tahun | Rp202.000,00         | Rp144.000,00               | Rp11.000,00                              |
| 12. | JAWA BARAT          | m <sup>2</sup> /tahun | Rp178.000,00         | Rp102.000,00               | Rp10.000,00                              |
| 13. | D.K.I. JAKARTA      | m <sup>2</sup> /tahun | Rp206.000,00         | Rp153.000,00               | Rp11.000,00                              |
| 14. | JAWA TENGAH         | m <sup>2</sup> /tahun | Rp173.000,00         | Rp97.000,00                | Rp10.000,00                              |
| 15. | D.I. YOGYAKARTA     | m <sup>2</sup> /tahun | Rp168.000,00         | Rp97.000,00                | Rp10.000,00                              |
| 16. | JAWA TIMUR          | m <sup>2</sup> /tahun | Rp196.000,00         | Rp170.000,00               | Rp10.000,00                              |
| 17. | BALI                | m <sup>2</sup> /tahun | Rp200.000,00         | Rp148.000,00               | Rp10.000,00                              |
| 18. | NUSA TENGGARA BARAT | m <sup>2</sup> /tahun | Rp223.000,00         | Rp185.000,00               | Rp12.000,00                              |
| 19. | NUSA TENGGARA TIMUR | m <sup>2</sup> /tahun | Rp197.000,00         | Rp129.000,00               | Rp10.000,00                              |
| 20. | KALIMANTAN BARAT    | m <sup>2</sup> /tahun | Rp201.000,00         | Rp136.000,00               | Rp11.000,00                              |
| 21. | KALIMANTAN TENGAH   | m <sup>2</sup> /tahun | Rp236.000,00         | Rp155.000,00               | Rp12.000,00                              |
| 22. | KALIMANTAN SELATAN  | m <sup>2</sup> /tahun | Rp196.000,00         | Rp148.000,00               | Rp11.000,00                              |
| 23. | KALIMANTAN TIMUR    | m <sup>2</sup> /tahun | Rp242.000,00         | Rp200.000,00               | Rp13.000,00                              |
| 24. | KALIMANTAN UTARA    | m <sup>2</sup> /tahun | Rp242.000,00         | Rp200.000,00               | Rp13.000,00                              |
| 25. | SULAWESI UTARA      | m <sup>2</sup> /tahun | Rp187.000,00         | Rp122.000,00               | Rp10.000,00                              |
| 26. | GORONTALO           | m <sup>2</sup> /tahun | Rp196.000,00         | Rp138.000,00               | Rp14.000,00                              |
| 27. | SULAWESI BARAT      | m <sup>2</sup> /tahun | Rp356.000,00         | Rp296.000,00               | Rp18.000,00                              |

28. SULAWESI SELATAN . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 38 -

| NO. | PROVINSI          | SATUAN                | GEDUNG<br>BERTINGKAT | GEDUNG TIDAK<br>BERTINGKAT | HALAMAN<br>GEDUNG/<br>BANGUNAN<br>KANTOR |
|-----|-------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------------------|
| (1) | (2)               | (3)                   | (4)                  | (5)                        | (6)                                      |
| 28. | SULAWESI SELATAN  | m <sup>2</sup> /tahun | Rp209.000,00         | Rp190.000,00               | Rp11.000,00                              |
| 29. | SULAWESI TENGAH   | m <sup>2</sup> /tahun | Rp226.000,00         | Rp168.000,00               | Rp12.000,00                              |
| 30. | SULAWESI TENGGARA | m <sup>2</sup> /tahun | Rp197.000,00         | Rp144.000,00               | Rp10.000,00                              |
| 31. | MALUKU            | m <sup>2</sup> /tahun | Rp223.000,00         | Rp197.000,00               | Rp14.000,00                              |
| 32. | MALUKU UTARA      | m <sup>2</sup> /tahun | Rp229.000,00         | Rp153.000,00               | Rp14.000,00                              |
| 33. | PAPUA             | m <sup>2</sup> /tahun | Rp487.000,00         | Rp277.000,00               | Rp25.000,00                              |
| 34. | PAPUA BARAT       | m <sup>2</sup> /tahun | Rp632.000,00         | Rp469.000,00               | Rp32.000,00                              |

#### 4.2. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:

- 1) kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
- 2) pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaul*.

Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas terinci pada Tabel 2.8, Tabel 2.9, dan Tabel 2.10.

TABEL 2.8 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 39 -

**TABEL 2.8**  
**SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT**

| NO. | PROVINSI                 | SATUAN     | BESARAN         |
|-----|--------------------------|------------|-----------------|
| (1) | (2)                      | (3)        | (4)             |
| I   | KEPALA DAERAH/KETUA DPRD | Unit/Tahun | Rp41.900.000,00 |
| II  | ANGGOTA DPRD             | Unit/Tahun | Rp41.000.000,00 |
| III | PEJABAT ESELON I         | Unit/Tahun | Rp40.000.000,00 |
| IV  | PEJABAT ESELON II        |            |                 |
| 1.  | ACEH                     | Unit/Tahun | Rp39.850.000,00 |
| 2.  | SUMATERA UTARA           | Unit/Tahun | Rp38.420.000,00 |
| 3.  | RIAU                     | Unit/Tahun | Rp38.530.000,00 |
| 4.  | KEPULAUAN RIAU           | Unit/Tahun | Rp38.280.000,00 |
| 5.  | JAMBI                    | Unit/Tahun | Rp39.240.000,00 |
| 6.  | SUMATERA BARAT           | Unit/Tahun | Rp39.190.000,00 |
| 7.  | SUMATERA SELATAN         | Unit/Tahun | Rp38.550.000,00 |
| 8.  | LAMPUNG                  | Unit/Tahun | Rp38.670.000,00 |
| 9.  | BENGKULU                 | Unit/Tahun | Rp38.580.000,00 |
| 10. | BANGKA BELITUNG          | Unit/Tahun | Rp38.250.000,00 |
| 11. | BANTEN                   | Unit/Tahun | Rp38.410.000,00 |
| 12. | JAWA BARAT               | Unit/Tahun | Rp38.330.000,00 |
| 13. | D.K.I. JAKARTA           | Unit/Tahun | Rp38.730.000,00 |
| 14. | JAWA TENGAH              | Unit/Tahun | Rp39.950.000,00 |
| 15. | D.I. YOGYAKARTA          | Unit/Tahun | Rp39.950.000,00 |
| 16. | JAWA TIMUR               | Unit/Tahun | Rp38.610.000,00 |
| 17. | BALI                     | Unit/Tahun | Rp39.950.000,00 |
| 18. | NUSA TENGGARA BARAT      | Unit/Tahun | Rp39.100.000,00 |
| 19. | NUSA TENGGARA TIMUR      | Unit/Tahun | Rp37.980.000,00 |
| 20. | KALIMANTAN BARAT         | Unit/Tahun | Rp38.750.000,00 |
| 21. | KALIMANTAN TENGAH        | Unit/Tahun | Rp38.990.000,00 |

22. KALIMANTAN SELATAN . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 40 -

| NO. | PROVINSI           | SATUAN     | BESARAN         |
|-----|--------------------|------------|-----------------|
| (1) | (2)                | (3)        | (4)             |
| 22. | KALIMANTAN SELATAN | Unit/Tahun | Rp38.990.000,00 |
| 23. | KALIMANTAN TIMUR   | Unit/Tahun | Rp38.560.000,00 |
| 24. | KALIMANTAN UTARA   | Unit/Tahun | Rp38.560.000,00 |
| 25. | SULAWESI UTARA     | Unit/Tahun | Rp38.480.000,00 |
| 26. | GORONTALO          | Unit/Tahun | Rp38.150.000,00 |
| 27. | SULAWESI BARAT     | Unit/Tahun | Rp37.180.000,00 |
| 28. | SULAWESI SELATAN   | Unit/Tahun | Rp38.630.000,00 |
| 29. | SULAWESI TENGAH    | Unit/Tahun | Rp39.050.000,00 |
| 30. | SULAWESI TENGGARA  | Unit/Tahun | Rp39.540.000,00 |
| 31. | MALUKU             | Unit/Tahun | Rp39.140.000,00 |
| 32. | MALUKU UTARA       | Unit/Tahun | Rp38.230.000,00 |
| 33. | PAPUA              | Unit/Tahun | Rp38.770.000,00 |
| 34. | PAPUA BARAT        | Unit/Tahun | Rp38.840.000,00 |

**TABEL 2.9**

**SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL**

| NO. | PROVINSI            | SATUAN     | RODA EMPAT      | DOUBLE<br>GARDAN | RODA DUA       |
|-----|---------------------|------------|-----------------|------------------|----------------|
| (1) | (2)                 | (3)        | (4)             | (5)              | (6)            |
| 1.  | ACEH                | Unit/Tahun | Rp34.620.000,00 | Rp37.640.000,00  | Rp3.930.000,00 |
| 2.  | SUMATERA UTARA      | Unit/Tahun | Rp33.470.000,00 | Rp36.070.000,00  | Rp3.700.000,00 |
| 3.  | RIAU                | Unit/Tahun | Rp33.560.000,00 | Rp36.210.000,00  | Rp3.670.000,00 |
| 4.  | KEPULAUAN RIAU      | Unit/Tahun | Rp33.350.000,00 | Rp35.930.000,00  | Rp3.570.000,00 |
| 5.  | JAMBI               | Unit/Tahun | Rp34.130.000,00 | Rp36.970.000,00  | Rp3.810.000,00 |
| 6.  | SUMATERA BARAT      | Unit/Tahun | Rp34.100.000,00 | Rp36.930.000,00  | Rp3.850.000,00 |
| 7.  | SUMATERA<br>SELATAN | Unit/Tahun | Rp33.580.000,00 | Rp36.200.000,00  | Rp3.670.000,00 |
| 8.  | LAMPUNG             | Unit/Tahun | Rp33.670.000,00 | Rp36.330.000,00  | Rp3.700.000,00 |

9. BENGKULU . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

| NO. | PROVINSI               | SATUAN     | RODA EMPAT      | DOUBLE<br>GARDAN | RODA DUA       |
|-----|------------------------|------------|-----------------|------------------|----------------|
| (1) | (2)                    | (3)        | (4)             | (5)              | (6)            |
| 9.  | BENGKULU               | Unit/Tahun | Rp33.600.000,00 | Rp36.230.000,00  | Rp3.680.000,00 |
| 10. | BANGKA<br>BELITUNG     | Unit/Tahun | Rp33.330.000,00 | Rp35.860.000,00  | Rp3.610.000,00 |
| 11. | BANTEN                 | Unit/Tahun | Rp33.410.000,00 | Rp36.090.000,00  | Rp3.580.000,00 |
| 12. | JAWA BARAT             | Unit/Tahun | Rp33.350.000,00 | Rp35.990.000,00  | Rp3.560.000,00 |
| 13. | D.K.I. JAKARTA         | Unit/Tahun | Rp33.650.000,00 | Rp36.450.000,00  | Rp3.640.000,00 |
| 14. | JAWA TENGAH            | Unit/Tahun | Rp34.880.000,00 | Rp38.050.000,00  | Rp3.950.000,00 |
| 15. | D.I. YOGYAKARTA        | Unit/Tahun | Rp34.680.000,00 | Rp37.780.000,00  | Rp3.910.000,00 |
| 16. | JAWA TIMUR             | Unit/Tahun | Rp33.600.000,00 | Rp36.280.000,00  | Rp3.650.000,00 |
| 17. | BALI                   | Unit/Tahun | Rp35.210.000,00 | Rp38.400.000,00  | Rp4.110.000,00 |
| 18. | NUSA TENGGARA<br>BARAT | Unit/Tahun | Rp34.060.000,00 | Rp36.810.000,00  | Rp3.810.000,00 |
| 19. | NUSA TENGGARA<br>TIMUR | Unit/Tahun | Rp33.140.000,00 | Rp35.550.000,00  | Rp3.580.000,00 |
| 20. | KALIMANTAN<br>BARAT    | Unit/Tahun | Rp34.160.000,00 | Rp36.360.000,00  | Rp3.760.000,00 |
| 21. | KALIMANTAN<br>TENGAH   | Unit/Tahun | Rp35.710.000,00 | Rp38.290.000,00  | Rp4.150.000,00 |
| 22. | KALIMANTAN<br>SELATAN  | Unit/Tahun | Rp34.380.000,00 | Rp36.620.000,00  | Rp3.800.000,00 |
| 23. | KALIMANTAN<br>TIMUR    | Unit/Tahun | Rp34.010.000,00 | Rp36.130.000,00  | Rp3.700.000,00 |
| 24. | KALIMANTAN<br>UTARA    | Unit/Tahun | Rp33.660.000,00 | Rp35.680.000,00  | Rp3.620.000,00 |
| 25. | SULAWESI UTARA         | Unit/Tahun | Rp33.930.000,00 | Rp36.060.000,00  | Rp3.710.000,00 |
| 26. | GORONTALO              | Unit/Tahun | Rp33.670.000,00 | Rp35.690.000,00  | Rp3.670.000,00 |
| 27. | SULAWESI BARAT         | Unit/Tahun | Rp32.470.000,00 | Rp34.690.000,00  | Rp3.360.000,00 |
| 28. | SULAWESI<br>SELATAN    | Unit/Tahun | Rp33.630.000,00 | Rp36.320.000,00  | Rp3.640.000,00 |
| 29. | SULAWESI<br>TENGAH     | Unit/Tahun | Rp34.450.000,00 | Rp36.660.000,00  | Rp3.840.000,00 |

30. SULAWESI TENGGARA . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 42 -

| NO. | PROVINSI             | SATUAN     | RODA EMPAT      | DOUBLE<br>GARDAN | RODA DUA       |
|-----|----------------------|------------|-----------------|------------------|----------------|
| (1) | (2)                  | (3)        | (4)             | (5)              | (6)            |
| 30. | SULAWESI<br>TENGGERA | Unit/Tahun | Rp34.880.000,00 | Rp37.210.000,00  | Rp3.940.000,00 |
| 31. | MALUKU               | Unit/Tahun | Rp34.560.000,00 | Rp36.730.000,00  | Rp3.940.000,00 |
| 32. | MALUKU UTARA         | Unit/Tahun | Rp33.750.000,00 | Rp35.740.000,00  | Rp3.760.000,00 |
| 33. | PAPUA                | Unit/Tahun | Rp34.260.000,00 | Rp36.310.000,00  | Rp4.000.000,00 |
| 34. | PAPUA BARAT          | Unit/Tahun | Rp34.300.000,00 | Rp36.390.000,00  | Rp3.920.000,00 |

**TABEL 2.10**  
**SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN OPERASIONAL**  
**DALAM LINGKUNGAN KANTOR, RODA 6, DAN *SPEED BOAT***

| NO. | URAIAN                              | SATUAN     | BESARAN         |
|-----|-------------------------------------|------------|-----------------|
| (1) | (2)                                 | (3)        | (4)             |
| 1.  | Operasional dalam Lingkungan Kantor | Unit/Tahun | Rp9.750.000,00  |
| 2.  | Roda 6                              | Unit/Tahun | Rp37.110.000,00 |
| 3.  | <i>Speed Boat</i>                   | Unit/Tahun | Rp20.240.000,00 |

**4.3. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR**

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal komputer/*notebook*, printer, AC split, dan *genset* agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan *genset* belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya Pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian *toner*.

Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor terinci pada Tabel 2.11.

TABEL 2.11 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

TABEL 2.11  
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

| NO  | URAIAN                         | SATUAN        | BESARAN         |
|-----|--------------------------------|---------------|-----------------|
| (1) | (2)                            | (3)           | (4)             |
| 1.  | Inventaris Kantor              | Pegawai/Tahun | Rp80.000,00     |
| 2.  | Personal Computer/Notebook     | Unit/Tahun    | Rp730.000,00    |
| 3.  | Printer                        | Unit/Tahun    | Rp690.000,00    |
| 4.  | AC Split                       | Unit/Tahun    | Rp610.000,00    |
| 5.  | Genset lebih kecil dari 50 KVA | Unit/Tahun    | Rp7.190.000,00  |
| 6.  | Genset 75 KVA                  | Unit/Tahun    | Rp8.640.000,00  |
| 7.  | Genset 100 KVA                 | Unit/Tahun    | Rp10.150.000,00 |
| 8.  | Genset 125 KVA                 | Unit/Tahun    | Rp10.780.000,00 |
| 9.  | Genset 150 KVA                 | Unit/Tahun    | Rp13.260.000,00 |
| 10. | Genset 175 KVA                 | Unit/Tahun    | Rp14.810.000,00 |
| 11. | Genset 200 KVA                 | Unit/Tahun    | Rp15.850.000,00 |
| 12. | Genset 250 KVA                 | Unit/Tahun    | Rp16.790.000,00 |
| 13. | Genset 275 KVA                 | Unit/Tahun    | Rp17.760.000,00 |
| 14. | Genset 300 KVA                 | Unit/Tahun    | Rp20.960.000,00 |
| 15. | Genset 350 KVA                 | Unit/Tahun    | Rp22.960.000,00 |
| 16. | Genset 450 KVA                 | Unit/Tahun    | Rp25.620.000,00 |
| 17. | Genset 500 KVA                 | Unit/Tahun    | Rp31.770.000,00 |

Keterangan:

OJ : Orang/Jam  
OH : Orang/Hari  
OB : Orang/Bulan  
OT : Orang/Tahun  
OP : Orang/Paket  
OK : Orang/Kegiatan  
OR : Orang/Responden  
Oter : Orang/Terbitan  
OJP : Orang/Jam Pelajaran

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Puti Bidang Hukum dan  
Undang-undangan,



Lydia Silvanna Djaman